



LAPORAN KINERJA 2023

PUSAT PENGUATAN KARAKTER



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya, sehingga Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Setjen Kemendikbudristek dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2023 dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban Puspeka atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar setiap instansi pemerintah menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan Kinerja Puspeka menyajikan informasi kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Puspeka Tahun 2023, yang menetapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan. Secara keseluruhan Puspeka telah berhasil merealisasikan berbagai target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran obyektivitas dan optimalisasi capaian kinerja yang dihasilkan oleh Puspeka pada tahun 2023. Selain itu, hambatan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga diuraikan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi dan inovasi kerja kedepannya.

Laporan Kinerja Puspeka diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, serta perumusan kebijakan bidang penguatan karakter dalam upaya peningkatan kinerja Puspeka di tahun yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya Laporan Kinerja Puspeka Tahun 2023.

Jakarta, 27 Januari 2024

Kepala Pusat Penguatan Karakter,



**Rusprita Putri Utami, S.E., M.A.
NIP 198309052009122005**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR DIAGRAM	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	3
D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi	5
BAB II Perencanaan Kinerja	7
A. Tujuan Strategis.....	7
B. Rencana Kinerja Jangka Menengah	11
C. Perjanjian Kinerja.....	12
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	13
A. Capaian Kinerja.....	13
B. Realisasi Anggaran.....	58
C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative.....	59
BAB IV Penutup	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Rekomendasi	65
LAMPIRAN.....	67
Perjanjian Kinerja Awal.....	67
Perjanjian Kinerja Akhir	70
Pengukuran Kinerja Tahun 2023	73
Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 budaya kerja Puspeka.....	2
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Puspeka	4
Gambar 3.1 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 Puspeka.....	15
Gambar 3.2 konten lagu Profil Pelajar Pancasila.....	17
Gambar 3.3 Parade Dongeng Nusantara Bersama Sahabat Karakter	17
Gambar 3.4 Talkshow Penguatan Karakter Pancasila	18
Gambar 3.5 Infografis kompetisi kreasi konten GNRM	18
Gambar 3.6 aktivasi konten video animasi Profil Pelajar Pancasila.....	19
Gambar 3.7 Aktivasi konten cerdas melawan narkoba dan Stop Judi Online	19
Gambar 3.8 Infografis bentuk-bentuk kekerasan	21
Gambar 3.9 Infografis Tata cara pembentukan.....	22
Gambar 3.10 Tata cara pembentukan Satuan Tugas tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ...	23
Gambar 3.11 peluncuran Merdeka belajar episode 25.....	29
Gambar 3.12 Pendampingan pengisian instrumen pengukuran capaian implementasi penguatan karakter terkait Tiga Dosa Besar Pendidikan	29
Gambar 3.13 kegiatan peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan terkait PPKSP	30
Gambar 3.14 aktivasi konten tutorial pelaporan pembentukan TPPK dan Satgas PPKSP.....	30
Gambar 3.15 pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah yang paling berkomitmen dalam pengimplementasian PPKSP.....	30
Gambar 3.16 pelaksanaan Training of Trainer (ToT) Fasilitator Nasional	31
Gambar 3.17 pelaksanaan peningkatan kapasitas satgas PPKS.....	31
Gambar 3.18 aktivasi konten 2 tahun permendikbudristek nomor 30 tahun 2021	32
Gambar 3.19 Aktivasi Pameran, Obrolan, dan Diskusi Kekerasan Seksual (POD.Ks).....	32
Gambar 3.20 pelaksanaan bimtek roots	33
Gambar 3.21 aktivasi panggung apresiasi dan berbagi praktik baik Program Roots	33
Gambar 3.22 pelaksanaan webinar sehat mental tanpa perundungan.....	34
Gambar 3.23 aktivasi konten anti perundungan	34
Gambar 3.24 aktivasi konten Hari roots Nasional	34
Gambar 3.25 Aktivasi konten kebinekaan	35
Gambar 3.26 pelaksanaan Sosialisasi produk kebinekaan.....	35
Gambar 3.27 aktivasi konten webinar praktik baik belajar kebinekaan	36
Gambar 3.28 aktivasi kampanye 1 juta kampanye toleransi.....	36
Gambar 3.29 laman pencegahan intoleransi	36
Gambar 3.30 pelaksanaan penyebarluasan materi Inklusivitas dan Kebinekaan	43
Gambar 3.31 infografis pelaksanaan webinar hari Perempuan internasional.....	43
Gambar 3.32 aktivasi peringatan Hari Penyandang Disabilitas Internasional.....	44
Gambar 3.33 aktivasi konten Bahasa isyarat	44
Gambar 3.34 aktivasi konten Hari Kesadaran Autisme.....	45
Gambar 3.35 Aktivasi konten peringatan Hari Kartini	45
Gambar 3.36 kebijakan penguatan pendidikan karakter.....	48

Gambar 3.37 Koordinasi Rencana Tindak Lanjut implementasi penguatan karakter	49
Gambar 3.38 laman WKMB	60
Gambar 3.39 portal PPKSP.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	iii
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Awal.....	8
Tabel 2.2 Anggaran Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2023.....	8
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Akhir	9
Tabel 2.4 Anggaran Perjanjian Kinerja Akhir Tahun 2023	9
Tabel 2.5 Rencana Kinerja Jangka Menengah Puspeka	11
Tabel 2.6 jumlah satuan Pendidikan yang membentuk TPPK.....	26
Tabel 3.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Puspeka	13
Tabel 3.2 jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang membentuk Satgas PPKSP	26
Tabel 3.3 target dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.4 Puspeka.....	47

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Grafik Penyerapan anggaran Puspeka di Tahun Anggaran 2023	ii
Diagram 1.2 Grafik capaian dan target kinerja kegiatan PUSPEKA di tahun anggaran 2023	iii
Diagram 1.3 jumlah pegawai di Puspeka.....	4
Diagram 3.1 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 Puspeka.....	15
Diagram 3.2 jumlah sebaran daerah yang mendapatkan materi Profil Pelajar Pancasila.....	16
Diagram 3.3 target dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.2 Puspeka	24
Diagram 3.4 jumlah sebaran daerah yang mendapatkan materi penuntasan 3 dosa besar pendidikan.....	25
Diagram 3.5 target dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.3 Puspeka	41
Diagram 3.6 jumlah sebaran daerah yang mendapatkan materi Inklusivitas dan Kesetaraan Gender.....	42
Diagram 3.7 jumlah daerah sebaran yang berkomitmen terhadap penguatan karakter	48
Diagram 3.8 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 Puspeka.....	52
Diagram 3.9 Nilai Kinerja Anggaran.....	55
Diagram 3.10 capaian EKA	55
Diagram 3.11 capaian IKPA.....	56
Diagram 3.12 Indikator Kinerja Kegiatan 2.2 Puspeka	56
Diagram 3.13 realisasi anggaran.....	58

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Puspeka Tahun 2023 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini.

Secara umum, capaian kinerja Puspeka Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Diagram 1. 1 Grafik Penyerapan anggaran Puspeka di Tahun Anggaran 2023

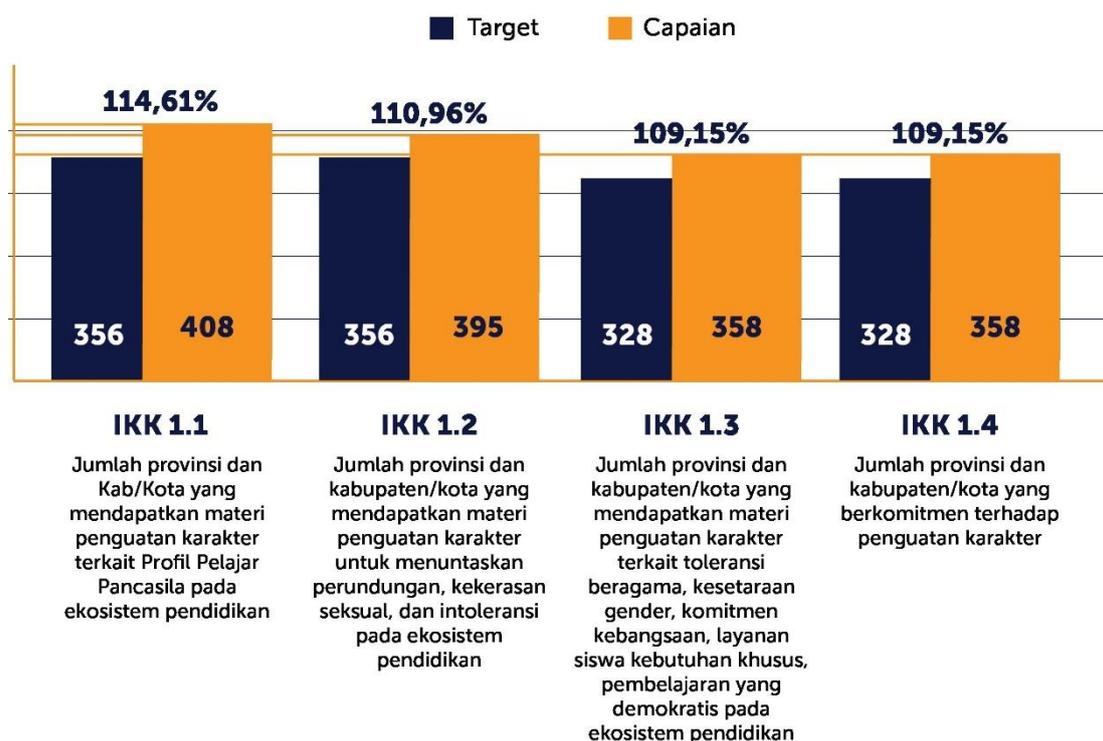


Diagram 1. 2 Grafik capaian dan target kinerja kegiatan PUSPEKA di tahun anggaran 2023

Tabel 1. 1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

KODE	URAIAN	TARGET	CAPAIAN (%)
SK	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan		
IKK 1.1	Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan	356	408 (114,61%)
IKK 1.2	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan	356	395 (110,96%)
IKK 1.3	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	328	358 (109,15%)
IKK 1.4	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter	328	358 (109,15%)

	TARGET	REALISASI	%
IKK 2.1 Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter Minimal BB	A	A	100
IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	90,80	96,90	106,71

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Sasaran penyebarluasan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila, sebagian berada di wilayah yang sulit diakses sehingga menyulitkan untuk mengundang peserta;
2. Capaian jumlah penonton tayangan produksi konten dan aktivasi di berbagai media sosial milik PUSPEKA belum optimal, dikarenakan keterbatasan perangkat IT dan jaringan/koneksi, dan kuota paket data di beberapa daerah yang terbatas/mahal;
3. Beberapa dinas pendidikan belum menyiapkan pagu anggaran untuk menindaklanjuti materi penguatan karakter ke satuan pendidikan;
4. Masih kurangnya pengetahuan terkait Profil Pelajar Pancasila seperti dari satuan kerja lain, Kementerian/Lembaga, maupun komunitas pada saat koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan;
5. Masih ada beberapa tim Satgas PPKS yang tidak mengirimkan proporsi perwakilannya dengan lengkap;
6. Masih banyak sekolah yang tidak mengirimkan perwakilan fasilitator guru untuk mengikuti Bimtek Anti Perundungan;
7. Beberapa fasilitator nasional kurang aktif dalam mendorong wilayahnya untuk melaksanakan Program Roots/Pencegahan Perundungan;
8. Masih ada daerah yang belum mengimplementasi usulan Rencana Tindak Lanjut diseminasi Produk Kebinekaan;
9. Penyebarluasan materi inklusivitas dan kesetaraan gender masih terbatas di beberapa wilayah.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:

1. Bekerjasama dengan komunitas atau Jaringan Masyarakat Sipil yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang berhubungan langsung dengan masyarakat, untuk membantu menyebarluaskan materi penguatan karakter;

2. Mengadvokasi dinas pendidikan untuk menyiapkan regulasi tingkat daerah supaya dapat digunakan sebagai landasan perencanaan;
3. Menjalinkan komunikasi rutin dengan para pemangku kepentingan;
4. Menyampaikan materi dan konten-konten penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila kepada satuan kerja lain, Kementerian/Lembaga, maupun komunitas agar mendapatkan gambaran dalam mengidentifikasi program yang terkait dengan Profil Pelajar Pancasila;
5. Proporsi perwakilan digantikan dengan unsur lainnya dengan tetap mengutamakan satgas PPKS;
6. Menghubungi pihak-pihak terkait dari Dinas Pendidikan maupun Kepala Sekolah agar dapat mengirimkan Fasilitator Guru yang dapat mengikuti Bimtek Anti Perundungan;
7. Melakukan koordinasi secara intensif dengan para fasilitator nasional untuk mendorong wilayahnya untuk melaksanakan program roots;
8. Memprioritaskan sasaran wilayah dari hasil Asesmen Nasional terkait Penguatan Karakter.

BAB I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum



“Tujuan pembentukan lembaga Pusat Penguatan Karakter adalah untuk membumikan Pancasila agar bisa dipahami oleh kalangan milenial.”

Nadiem Anwar Makarim
Raker dengan Komisi X DPR
28 Januari

Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) merupakan satuan kerja yang dibentuk karena adanya kebutuhan untuk mendukung keberhasilan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang merupakan program prioritas Kabinet Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang berfokus terhadap pendidikan penguatan karakter. Selain itu, munculnya berbagai isu yang tidak selaras dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, seperti radikalisasi, kekerasan seksual, perundungan, perlakuan kekerasan di satuan

pendidikan mendorong perlunya unit khusus yang mengkoordinasi penuntasan isu tersebut. Puspeka diharapkan dapat memastikan kebijakan terkait Penguatan Karakter dapat dipahami oleh ekosistem pendidikan yaitu satuan pendidikan, orang tua dan masyarakat.

Salah satu amanat utama yang dibebankan terhadap Puspeka adalah untuk membumikan Pancasila agar dipahami oleh kalangan milenial. Hal ini disampaikan oleh Mendikbudristek pada saat rapat kerja dengan Komisi X DPR (Bidang Pendidikan) pada tanggal 28 Januari 2020. Tujuan utama tersebutlah yang mendasari Puspeka untuk melakukan strategi kampanye komunikasi publik jangkauan luas dan terbatas (*below the line* dan *above the line*) dengan harapan bisa membuat masyarakat sadar, paham, ikut bergabung dan berpartisipasi dalam upaya tercapainya tujuan perubahan paradigma dan perilaku di lingkungan satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024).

Puspeka merupakan unsur pendukung tugas dan fungsi Kemendikbudristek di bidang penguatan karakter yang berperan sebagai koordinator (*leading sector*) Penguatan Karakter di lingkungan Kemendikbudristek. Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya, Puspeka melakukan koordinasi dengan berbagai satuan kerja pada unit utama

di lingkungan Kemendikbudristek serta menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga maupun pemangku kepentingan lainnya.



Gambar 1. 1 budaya kerja Puspeka

Puspeka dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya, telah merumuskan prinsip atau budaya kerja internal yaitu “PUSPEKA”, dimana P untuk Profesional, U untuk Unggul, S untuk Sinergis, P untuk Prima, E untuk Empati, K untuk Kreatif, dan A untuk Amanah (singkatan dari Puspeka) sebagai acuan/internalisasi yang harus dilaksanakan dan dibudayakan oleh seluruh pegawai dilingkungan Puspeka.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717); dan
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Puspeka memiliki tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penguatan karakter.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Pusat Penguatan Karakter menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. penyiapan kebijakan teknis di bidang penguatan karakter;
2. pelaksanaan penguatan karakter;
3. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penguatan karakter;
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan karakter; dan
5. pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

Pusat Penguatan Karakter saat ini dipimpin oleh Rusprita Putri Utami dengan didukung pegawai sebanyak 90 orang pegawai.

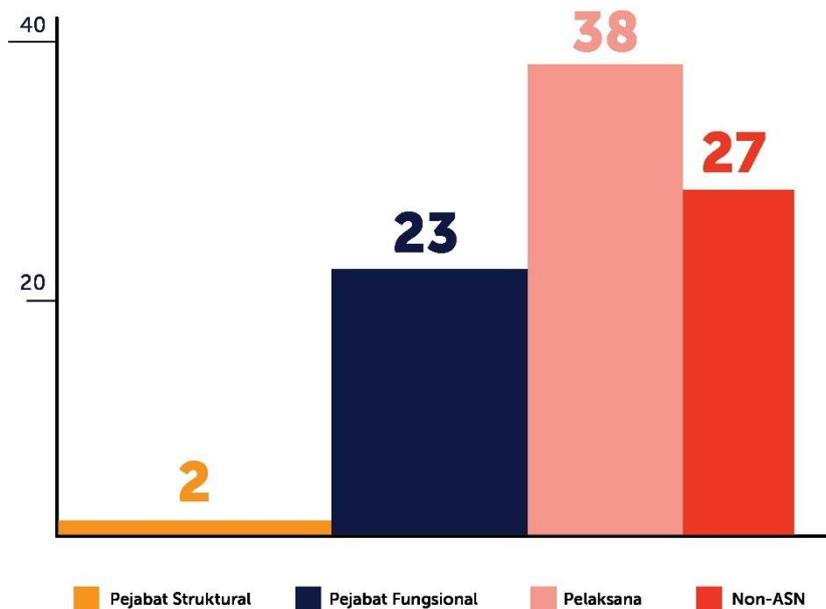
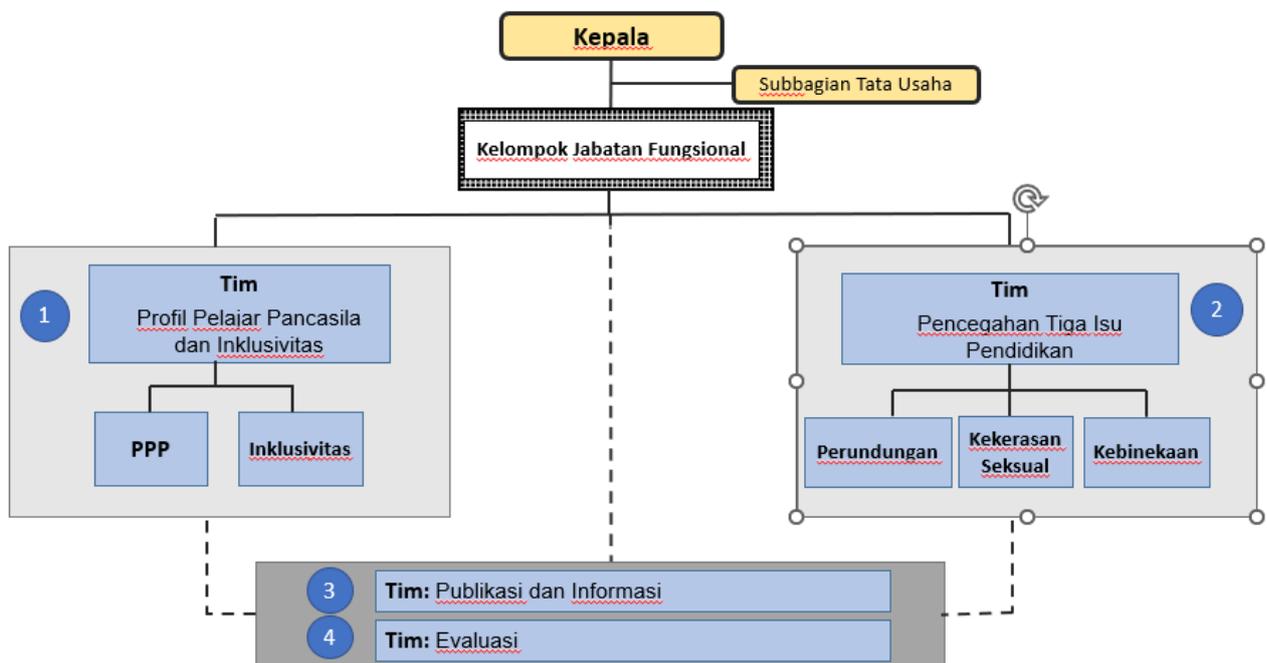


Diagram 1. 3 jumlah pegawai di Puspeka

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek, struktur Pusat Penguatan Karakter terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan bagan sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Puspeka

Dalam rangka mendukung percepatan peningkatan kinerja sesuai tugas dan fungsi Pusat Penguatan Karakter, Kepala Pusat Penguatan Karakter membentuk kelompok/tim kerja sesuai dengan SK Nomor 0026/SK/PUSPEKA/2023 tentang Penetapan Tim Kerja pada

Pusat Penguatan Karakter. Adapun setiap kelompok/tim mendukung dan bertanggungjawab pada tugas dan fungsi Puspeka, diantaranya:

1. Tim Profil Pelajar Pancasila dan Inklusivitas: Melaksanakan kegiatan penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila dan Inklusivitas.
2. Tim Pencegahan Tiga Isu Pendidikan: Melaksanakan kegiatan penguatan karakter terkait pencegahan tiga isu pendidikan (Kekerasan Seksual, Perundungan, Intoleransi).
3. Tim Publikasi dan Informasi Penguatan Karakter: Melaksanakan kolaborasi dan sinergitas dalam Publikasi dan Informasi Penguatan Karakter.
4. Tim Evaluasi Penguatan Karakter: Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang Penguatan Karakter.

D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

Isu-Isu Strategis

- a. Materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila, Tiga Dosa Besar Pendidikan (Perundungan, Kekerasan Seksual, dan Intoleransi), dan Inklusivitas, Kebinekaan (Toleransi Beragama, Kesetaraan Gender, Komitmen Kebangsaan, Layanan Siswa Kebutuhan Khusus, dan Pembelajaran yang Demokratis) baik berupa kebijakan, program, dan kampanye publik belum tersampaikan secara optimal kepada seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- b. Konten penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila, Tiga Dosa Besar Pendidikan (Perundungan, Kekerasan Seksual, dan Intoleransi), Inklusivitas, Kebinekaan (Toleransi Beragama, Kesetaraan Gender, Komitmen Kebangsaan, Layanan Siswa Kebutuhan Khusus, dan Pembelajaran yang Demokratis) belum banyak disebarkan secara optimal kepada ekosistem pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. Beragamnya kualitas tindak lanjut program/kegiatan dalam pengimplementasian materi penguatan karakter dari satuan pendidikan;
- d. Optimalisasi Pemanfaatan *Learning Management System*/portal merdeka dari kekerasan;
- e. Optimalisasi pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan, serta Satuan Tugas Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan.

Peran Strategis

- a. Berperan penting dalam menghasilkan kebijakan teknis dan melaksanakan penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila untuk menghasilkan generasi Pelajar Pancasila;
- b. Berperan penting dalam menghasilkan kebijakan teknis dan melaksanakan penguatan karakter dalam upaya penuntasan Tiga Dosa Besar Pendidikan (Perundungan, Kekerasan Seksual, dan Intoleransi) untuk menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
- c. Berperan penting dalam menghasilkan kebijakan teknis dan melaksanakan Inklusivitas dan Kebinekaan dalam upaya peningkatan Toleransi Beragama, Kesetaraan Gender,

Komitmen Kebangsaan, Layanan Siswa Kebutuhan Khusus, dan Pembelajaran yang Demokratis;

- d. Berperan penting dalam produksi konten penguatan karakter berkualitas untuk didiseminasikan kepada ekosistem pendidikan melalui berbagai platform;
- e. Berperan penting untuk mengoptimalkan pelibatan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, komunitas pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penguatan karakter di daerah;
- f. Berperan penting dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi kebijakan penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila, Tiga Dosa Besar Pendidikan (Perundungan, Kekerasan Seksual, dan Intoleransi), dan Inklusivitas Kebinekaan (Toleransi Beragama, Kesetaraan Gender, Komitmen Kebangsaan, Layanan Siswa Kebutuhan Khusus, dan Pembelajaran yang Demokrasi);
- g. Berperan penting dalam ketatausahaan pusat yang berkualitas dalam mewujudkan *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di Kemendikbudristek.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, PUSPEKA mendukung dan menjadi bagian dari visi dan misi Kemendikbudristek, yaitu:

Visi:

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung visi dan misi presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Misi:

Sesuai tugas dan kewenangannya, Kemendikbudristek melaksanakan misi presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Adapun dukungan Kemendikbudristek dalam melaksanakan misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi; dan
2. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

A. Tujuan Strategis

Tujuan strategis pada Pusat Penguatan Karakter yaitu meningkatnya internalisasi penguatan karakter.

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis PUSPEKA Tahun 2020-2024, merumuskan kinerja yang dicapai di tahun 2023 dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Awal pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Awal

Kode	Uraian	Target
		2023
SK	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan	
IKK 1.1	Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan	356
IKK 1.2	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan	356
IKK 1.3	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	328
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter	
IKK 2.1	Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	90,8

Tabel 2. 2 Anggaran Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2023

No.	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran Perjanjian Kinerja Awal
1	4268	Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter	Rp. 10.469.213.000
2	6393	Kebijakan Penguatan Karakter	Rp. 54.220.755.000
		Total	Rp. 64.689.968.000

Seiring berjalannya perencanaan dan pelaksanaan program selama tahun 2023, Pusat Penguatan Karakter mendapatkan usulan dari KemenpanRB berupa tambahan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter. Pada IKK tersebut merupakan indikator gabungan dari ketiga IKK yakni jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila, 3 dosa besar pendidikan, dan inklusivitas dan kebinekaan, yang mana seberapa komitmennya para dinas pendidikan dalam menerapi materi penguatan karakter dengan target IKK sebanyak 328.

Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan program/kegiatan serta alokasi anggaran di lingkungan PUSPEKA sesuai kebijakan baru dari Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan). PUSPEKA melakukan efisiensi anggaran atau *automatic adjustment* untuk mendukung program prioritas lainnya. Efisiensi anggaran ini berdampak pada penurunan anggaran kegiatan kebijakan Penguatan Karakter dari yang sebelumnya sebesar Rp

64.689.968.000 (Enam puluh empat milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) menjadi Rp 63.394.208.000 (Enam puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan ribu rupiah), sehingga dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja.

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Akhir

Kode	Uraian	Target
		2023
SK	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan	
IKK 1.1	Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan	356
IKK 1.2	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan	356
IKK 1.3	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	328
IKK 1.4	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter	328
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter	
IKK 2.1	Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	90,8

Tabel 2. 4 Anggaran Perjanjian Kinerja Akhir Tahun 2023

No.	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran Perjanjian Kinerja Akhir
1	4268	Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter	Rp. 10.469.213.000
2	6393	Kebijakan Penguatan Karakter	Rp. 52.924.995.000
		Total	Rp. 63.394.208.000

Puspeka memiliki program prioritas di tahun 2023, meliputi:

1. Layanan Penguatan Karakter terkait Profil Pelajar Pancasila.

Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis,

dan kreatif. Keenam dimensi Profil Pelajar Pancasila perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila.

Dalam pelaksanaan layanan penguatan karakter Profil elajar Pancasila, PUSPEKA melakukan a) penyusunan kebijakan penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila melalui analisis, pemetaan, pengembangan, kajian, koordinasi penguatan karakter profil pelajar Pancasila; b) pelaksanaan penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila dengan melakukan perancangan, produksi konten, penyebarluasan, dan pendampingan dan; c) supervisi dan evaluasi penguatan karakter profil pelajar Pancasila.

2. Layanan Penguatan Karakter terkait Iklim Keamanan Satuan Pendidikan.

Iklim sekolah yang positif, sistem pembelajarannya bersifat kooperatif, menghormati dan saling percaya. Siswa sebagai seorang pelajar hampir setiap hari berada di sekolah sebagai tempat menuntut ilmu, sehingga mereka cukup akrab bergaul dengan kondisi sekolah. Kondisi sekolah tersebut meliputi fasilitas sekolah yang memadai, bagaimana hubungan siswa dengan guru, tata tertib sekolah serta norma dan sanksi yang diterapkan. Guna mendukung iklim sekolah yang positif maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi telah menyusun Indeks Iklim Sekolah. Salah satu skor dari Indeks Iklim Sekolah adalah skor iklim keamanan satuan Pendidikan yang memperhatikan 3 (tiga) faktor, yaitu penuntasan dari perundungan (*bullying*), intoleransi dan kekerasan seksual.

Dalam pelaksanaan layanan penguatan karakter iklim keamanan satuan pendidikan, PUSPEKA melakukan a) penyusunan kebijakan peningkatan iklim keamanan satuan pendidikan melalui analisis, pemetaan, pengembangan, kajian, koordinasi penguatan iklim keamanan satuan pendidikan; b) pelaksanaan kebijakan peningkatan iklim keamanan satuan pendidikan dengan melakukan perancangan, produksi konten, penyebarluasan, pendampingan, bimbingan teknis penuntasan perundungan, fasilitasi dan kolaborasi penuntasan perundungan, kekerasan seksual, intoleransi, penguatan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan, dan advokasi intoleransi; dan c) supervisi dan evaluasi penguatan karakter iklim keamanan satuan pendidikan.

3. Layanan Penguatan Karakter terkait Inklusivitas dan Kebinekaan Satuan Pendidikan.

Iklim sekolah yang positif, sistem pembelajarannya bersifat kooperatif, menghormati dan saling percaya. Siswa sebagai seorang pelajar hampir setiap hari berada di sekolah sebagai tempat menuntut ilmu, sehingga mereka cukup akrab bergaul dengan kondisi sekolah. Kondisi sekolah tersebut meliputi fasilitas sekolah yang memadai, bagaimana hubungan siswa dengan guru, tata tertib sekolah serta norma dan sanksi yang diterapkan. Hubungan siswa dengan guru akan saling mempengaruhi satu sama lain. Hubungan sosial antara siswa dengan guru yang mutualistik merupakan unsur penting dalam kehidupan sekolah, hubungan siswa dengan siswa yang kurang baik, juga akan mengganggu dalam proses belajar. Guna mendukung iklim sekolah yang positif maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menyusun Indeks Iklim Sekolah. Salah satu skor

dari Indeks Iklim Sekolah adalah skor iklim keamanan satuan Pendidikan yang memperhatikan inklusivitas dan kebinekaan.

Dalam pelaksanaan layanan penguatan karakter inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan, PUSPEKA melakukan a) penyusunan kebijakan peningkatan iklim keamanan satuan pendidikan melalui analisis, pemetaan, pengembangan, kajian, koordinasi penguatan karakter inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan; b) pelaksanaan kebijakan peningkatan iklim keamanan satuan pendidikan dengan melakukan perancangan, produksi konten, penyebarluasan, pendampingan, dan bimbingan teknis peningkatan inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan; dan c) supervisi dan evaluasi penguatan karakter inklusivitas dan kebinekaan di satuan pendidikan.

B. Rencana Kinerja Jangka Menengah

Puspeka telah menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai mana pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. 5 Rencana Kinerja Jangka Menengah Puspeka

Kode	Uraian	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
SK	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan				
IKK 1.1	Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan	Provinsi dan Kab/Kota	219	356	548
IKK 1.2	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan	Provinsi dan Kab/Kota	191	356	548
IKK 1.3	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	Provinsi dan Kab/Kota	164	328	548
IKK 1.4	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter	Provinsi dan Kab/Kota	-	328	548
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter				
IKK 2.1	Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	Predikat	BB	A	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	Nilai	90,45	90,8	91,15

C. Perjanjian Kinerja

Kode	Uraian	Target
		2023
SK	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan	
IKK 1.1	Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan	356
IKK 1.2	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan	356
IKK 1.3	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	328
IKK 1.4	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter	328
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter	
IKK 2.1	Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	90,8

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023, Puspeka menetapkan 2 (dua) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Puspeka

Kode	Uraian	TARGET	CAPAIAN	%
SK	Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan			
IKK 1.1	Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan	356	408	114,61%
IKK 1.2	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan	356	395	110,96%
IKK 1.3	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	328	358	109,15%
IKK 1.4	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter	328	358	109,15%
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter			
IKK 2.1	Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	A	A	100,00%
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	90,8	96,90	106,72%

Hasil analisis dan uraian singkat terkait seluruh IKK tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan 1

Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan

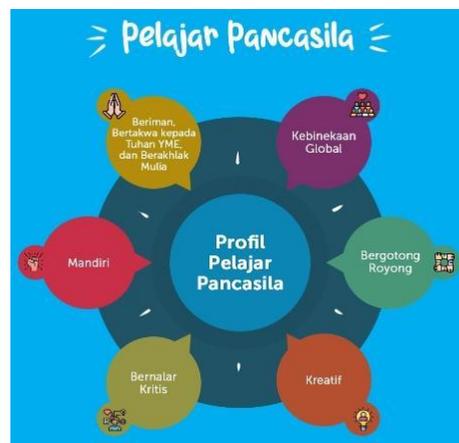
Pada tahun 2023, Pusat Penguatan Karakter memiliki 2 sasaran dengan 6 Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja di tahun 2023. Pada Triwulan III atas usulan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pusat Penguatan Karakter menambah Indikator Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 1 (satu) yaitu Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter ekosistem pendidikan.

Ketercapaian sasaran kegiatan ditandai dengan menguatnya pendidikan karakter pada peserta didik, diantaranya dalam hal pengimplementasian materi Profil Pelajar Pancasila, penuntasan 3 dosa besar pendidikan yakni kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, serta penguatan inklusivitas dan kebinekaan. Berikut penjelasan masing-masing Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan

Profil Pelajar Pancasila merupakan salah satu visi yang dimandatkan oleh Kemendikbudristek yang mendukung visi misi Presiden yaitu untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Materi Profil Pelajar Pancasila disebarluaskan ke seluruh Provinsi dan adapun metode yang dilakukan Pusat Penguatan Karakter dalam menyebarkan materi Profil Pelajar Pancasila antara lain seperti produksi konten, penyebaran konten, sosialisasi materi berupa buku saku atau buku panduan Profil Pelajar Pancasila untuk orang tua peserta didik, melakukan advokasi penguatan karakter kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, melakukan aktivasi penguatan karakter, bekerja sama dengan komunitas masyarakat sipil dan satuan pendidikan, serta monitoring dan evaluasi. Pada monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan sudah sejauh mana implementasi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada penerapan materi Profil Pelajar Pancasila.



6 Dimensi Profil Pelajar Pancasila

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang telah mendapatkan penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila. Tipe perhitungan dari IKK ini adalah kumulatif, dengan sumber data dari Laporan Pusat Penguatan Karakter dan Laporan Provinsi, kabupaten/kota.

Satuan	Provinsi/Kab/Kota
Tipe Penghitungan	Kumulatif
Unit Pelaksana	PUSPEKA
Sumber Data	Laporan PUSPEKA, Laporan Provinsi/Kabupaten/Kota
Polarisasi Indikator	Stabilize
Sumber Data	Triwulan



Diagram 3.1 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 Puspeka

Pada akhir tahun 2023, jumlah provinsi kabupaten/kota yang mendapatkan materi tersebut sebanyak 170 daerah. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023, jumlah provinsi kabupaten/kota yang mendapatkan materi terkait Profil Pelajar Pancasila sebanyak 408 daerah dan menargetkan daerah yang mendapatkan pemahaman materi tersebut sebanyak 356 daerah dengan persentase capaian sebesar 114,61% Berikut rincian provinsi yang telah mendapatkan materi Profil Pelajar Pancasila selama tahun 2023:

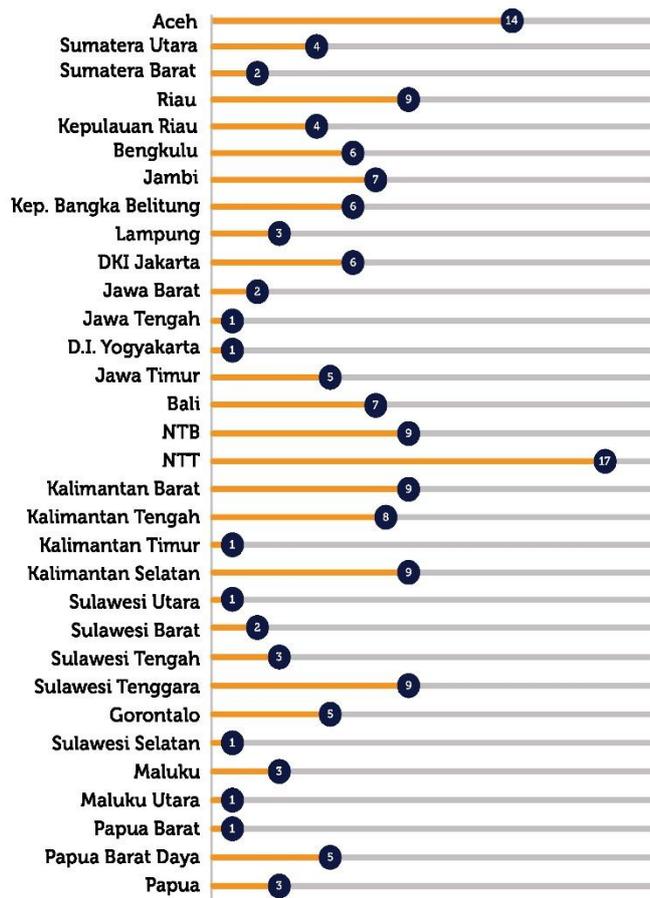


Diagram 3. 2 jumlah sebaran daerah yang mendapatkan materi Profil Pelajar Pancasila

Ketercapaian pada target ini dimungkinkan karena adanya kerjasama antara Puspeka dengan Kementerian /Lembaga terkait, Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota), komunitas masyarakat sipil, satuan pendidikan, dan keluarga. Selain itu, kegiatan yang dilakukan secara *hybrid* sehingga perwakilan daerah yang berhalangan hadir secara luring dapat menghadiri sosialisasi materi maupun melakukan pendampingan serta advokasi terkait materi Profil Pelajar Pancasila.

Bila dibandingkan dengan target akhir renstra, hingga saat ini telah tercapai 74,45% dari sasaran yang ditetapkan yaitu sebesar 548 daerah. Hal ini menunjukkan

bahwa target penyebarluasan materi Profil Pelajar Pancasila akan tercapai di tahun 2024 sesuai renstra.

a. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan, pada tahun 2023 Pusat Penguatan Karakter telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

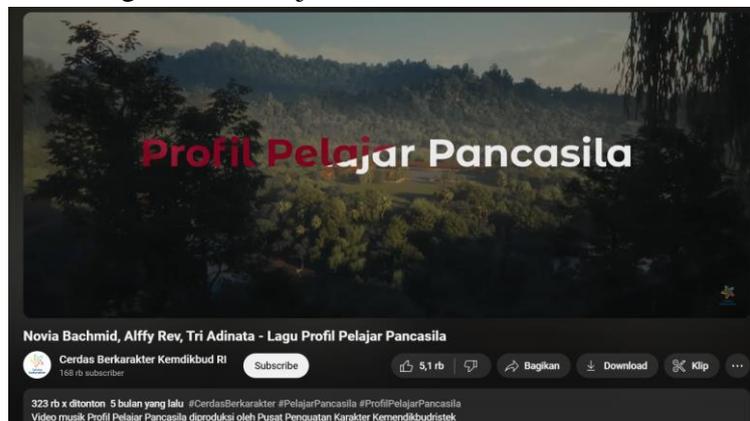
1. Menyampaikan penguatan dan pemahaman materi kebijakan penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun dilanjutkan dengan advokasi dan pendampingan untuk pengisian instrumen pengukuran capaian implementasi penguatan karakter terhadap substansi Profil Pelajar Pancasila (PPP);
2. Fasilitasi dan pendampingan pengimplementasian materi penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila;
3. Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antar satuan kerja, Kementerian/Lembaga, maupun komunitas terkait Profil Pelajar Pancasila;

4. Penyebarluasan (diseminasi) penguatan dan pemahaman terkait materi Profil Pelajar Pancasila berupa Buku Saku maupun Buku Panduan untuk jenjang dasar yang ditujukan kepada orang tua jenjang SD;



Gambar 3.1 Kegiatan Penyebarluasan Materi Profil Pelajar Pancasila

5. Produksi dan aktivasi lagu Profil Pelajar Pancasila;



Gambar 3. 2 konten lagu Profil Pelajar Pancasila

6. Memperkuat aktivasi konten seperti pelaksanaan gelar wicara (*talkshow*) tentang Pancasila dan “Parade Dongeng Nusantara Bersama Sahabat Karakter” dalam rangka mengkampanyekan Hari Anak Sedunia dan Hari Dongeng Nasional;



Gambar 3.3 Parade Dongeng Nusantara Bersama Sahabat Karakter



Gambar 3. 4 Talkshow Penguatan Karakter Pancasila

7. Kompetisi kreasi konten Gerakan Nasional Revolusi Mental;



Gambar 3. 5 Infografis kompetisi kreasi konten GNRM

8. Memperkuat aktivasi konten video animasi Profil Pelajar Pancasila "Diva The Series" Episode: Beriman, Bertaqwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia dan Episode Berkebinekaan Global;



Gambar 3. 6 aktivasi konten video animasi Profil Pelajar Pancasila

9. Memperkuat aktivasi konten video Profil Pelajar Pancasila tentang Cerdas Melawan Narkoba dan Stop Judi Online dalam rangka mendukung Rencana Aksi Nasional.



Gambar 3. 7 Aktivasi konten cerdas melawan narkoba dan Stop Judi Online

b. Analisis Faktor Keberhasilan

Adapun faktor keberhasilan yang telah dicapai pada kegiatan yang dilaksanakan Pusat Penguatan Karakter:

1. Pemanfaatan buku panduan terkait Profil Pelajar Pancasila sehingga dengan buku panduan yang telah disosialisasikan dapat diimplementasikan oleh para orang tua jenjang SD;
2. Adanya pemanfaatan konten Puspeka sebagai salah satu bahan pembelajaran baik di sekolah maupun di ekosistem pendidikan lainnya;
3. Banyaknya pengguna media sosial yang mengakses konten Puspeka terkait Profil Pelajar Pancasila;
4. Pelaksanaan aktivasi penguatan karakter yang diperuntukkan bagi ekosistem pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengetahuan terkait Profil Pelajar Pancasila.

c. Analisis hambatan dan permasalahan

Terkait analisis hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja, lebih kepada:

- 1) Masih ada perwakilan Dinas Pendidikan yang tidak hadir dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Penguatan Karakter bersama Ekosistem Pendidikan untuk mendapatkan materi terkait Profil Pelajar Pancasila;
- 2) Dibutuhkan narasumber/pembicara/talent yang tepat untuk Talkshow maupun konten Profil Pelajar Pancasila sesuai dengan tema;
- 3) Kurangnya pengetahuan K/L lain terkait Profil Pelajar Pancasila sehingga sulit mengeksplorasi program K/L lain yang terkait dengan Profil Pelajar Pancasila saat koordinasi lintas sektor;
- 4) Masih ada perwakilan sekolah yang tidak hadir karena belum efektifnya distribusi surat undangan dari Dinas Pendidikan;
- 5) Dinas pendidikan belum menyiapkan pagu anggaran untuk menindaklanjuti materi penguatan karakter ke satuan pendidikan;
- 6) Sasaran diseminasi buku Profil Pelajar Pancasila sebagian berada di wilayah yang sulit diakses sehingga menyulitkan untuk mengundang peserta;
- 7) Capaian jumlah penonton tayangan produksi konten dan aktivasi di berbagai media sosial milik PUSPEKA belum optimal, dikarenakan keterbatasan perangkat IT dan jaringan/koneksi, dan kuota paket data di beberapa daerah yang terbatas/mahal.

d. Langkah Antisipasi dan Strategis

Analisis terkait langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan:

- 1) Memberikan materi terkait Profil Pelajar Pancasila yang bisa diakses oleh perwakilan dinas pendidikan melalui online dan dalam flashdisk, serta menyampaikan media sosial Puspeka yang dapat diakses oleh perwakilan dinas pendidikan yang diundang;
- 2) Menentukan narasumber/pembicara/talent yang tepat untuk Talkshow Gen Pancasila maupun Konten Profil Pelajar Pancasila yang di produksi;
- 3) Menyampaikan materi dan konten-konten penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila kepada K/L agar mendapatkan gambaran dalam mengidentifikasi program yang terkait dengan Profil Pelajar Pancasila;
- 4) Mengefektifkan narahubung untuk mengkonfirmasi kehadiran perwakilan sekolah;
- 5) Mengadvokasi dinas pendidikan untuk menyiapkan regulasi tingkat daerah supaya dapat digunakan sebagai landasan perencanaan;
- 6) Bekerja sama dengan komunitas atau Jaringan Masyarakat Sipil yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang berhubungan langsung dengan masyarakat, untuk membantu menyebarkan;

Indikator Kinerja Kegiatan 1.2

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan

Tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan penting untuk dilakukan lebih serius dan tegas mengingat semakin tingginya insiden kekerasan di satuan pendidikan yang mengancam para peserta didik dan warga satuan pendidikan. Pada Merdeka Belajar Episode 25 tahun 2023, Kemendikbudristek telah meluncurkan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Tujuan permendikbudristek ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua, sehingga perlu untuk memberikan informasi kepada para pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat terkait tindakan kekerasan dan dapat menjadi pemantik untuk mengimplementasikan tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dalam lingkungan mereka masing-masing. Pencegahan dan penanganan kekerasan adalah aspek terpenting untuk mengurangi terjadinya kekerasan di satuan pendidikan.



Gambar 3. 8 Infografis bentuk-bentuk kekerasan

Dalam melakukan pencegahan, yang perlu segera dilakukan oleh satuan pendidikan antara lain menyusun dan melaksanakan tata tertib, membuat program PPKSP, serta membentuk

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan satuan pendidikan dan Satgas di tingkat provinsi.



Gambar 3. 9 Infografis Tata cara pembentukan



Gambar 3. 10 Tata cara pembentukan Satuan Tugas tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di bagi dari 3 dosa besar pendidikan, yaitu kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi. Pusat Penguatan Karakter mendapat amanah untuk menuntaskan 3 dosa besar pendidikan seperti menuntaskan kekerasan seksual dengan menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di seluruh Perguruan Tinggi Negeri, menuntaskan perundungan dengan menetapkan fasilitator guru dan agen perubahan di seluruh satuan pendidikan di Indonesia, dan menuntaskan intoleransi dengan menyosialisasikan materi produk kebinekaan.

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Tipe perhitungan ini dari IKK ini adalah kumulatif, dengan sumber data yang diperoleh berdasarkan dari laporan Pusat Penguatan Karakter dan laporan dari Provinsi, Kabupaten/Kota.

Satuan	Provinsi/Kab/Kota
Tipe Penghitungan	Kumulatif
Unit Pelaksana	PUSPEKA
Sumber Data	Laporan PUSPEKA, Laporan Provinsi/Kabupaten/Kota
Polarisasi Indikator	Stabilize
Sumber Data	Triwulan

Pada indikator ini menargetkan sebanyak 356 daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang mendapatkan penguatan dan pemahaman materi penguatan karakter untuk menuntaskan 3 dosa besar pendidikan (perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi) pada ekosistem pendidikan pada tahun 2023. Adapun program tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2023, dimana Puspeka telah melakukan pendampingan/visitasi langsung kepada daerah-daerah. Pada akhir tahun 2023, jumlah provinsi kabupaten/kota yang mendapatkan materi tersebut sebanyak 180 daerah. Per tanggal 31 Desember 2023, melalui produksi dan penyebarluasan konten-konten penguatan karakter dengan realisasi sebanyak 395 daerah (provinsi dan kabupaten/kota) telah mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan 3 dosa besar pendidikan pada ekosistem pendidikan. Capaian tersebut telah melampaui target sebesar 110,96% dari target awal sebanyak 356 daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Hingga akhir tahun 2023 terealisasi sebanyak 395 daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang telah mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan, atau sekitar 72,08% dari target jangka menengah/target akhir renstra sebanyak 548 daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) pada akhir 2024.

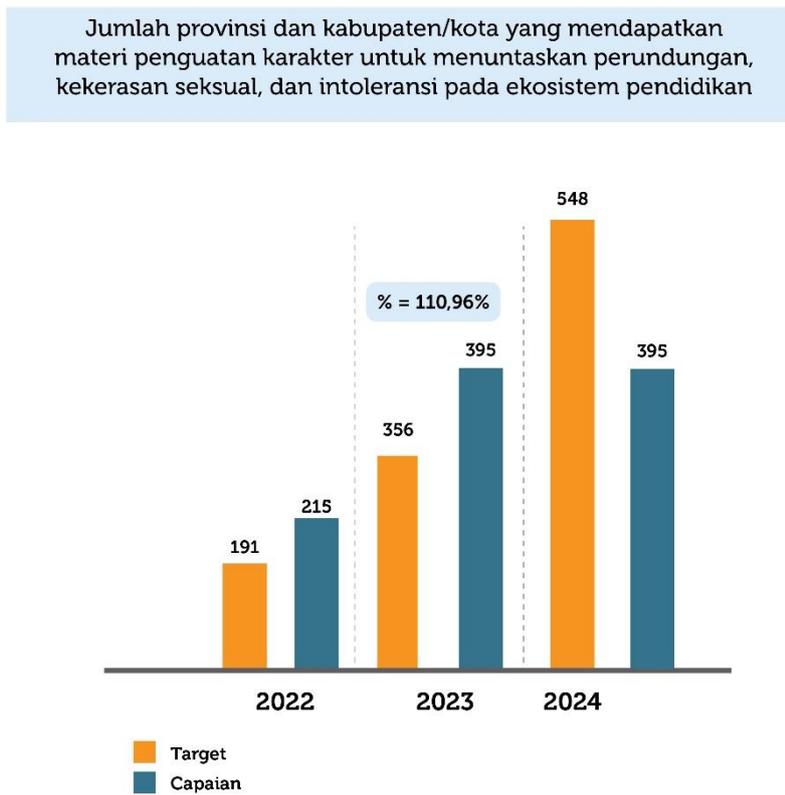


Diagram 3. 3 target dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.2 Puspeka

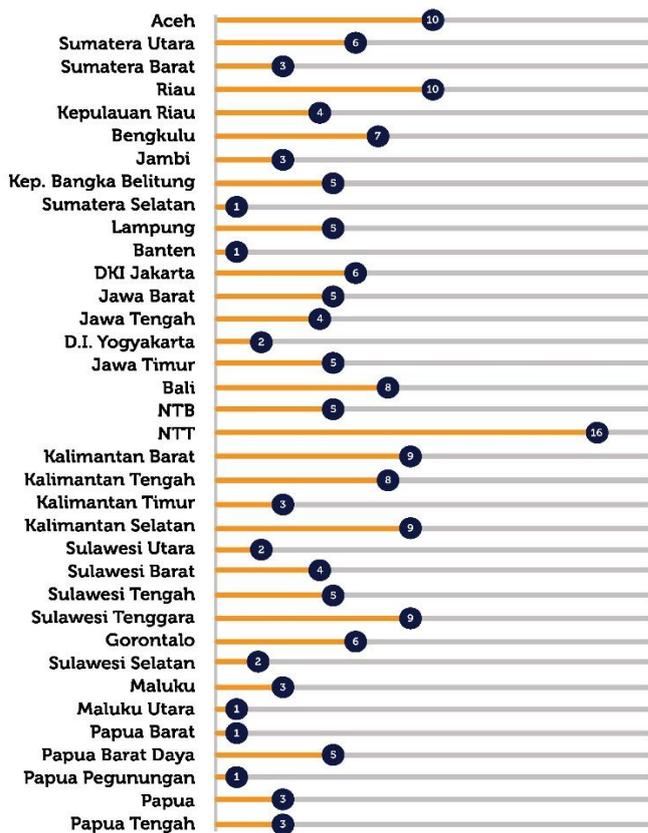


Diagram 3. 4 jumlah sebaran daerah yang mendapatkan materi penuntasan 3 dosa besar pendidikan

daerah yang berhalangan hadir secara luring dapat menghadiri sosialisasi materi maupun melakukan pendampingan serta advokasi terkait materi penuntasan 3 dosa besar pendidikan dan mampu melebihi target sebaran daerah.

Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan oleh Pusat Penguatan Karakter telah mendapat respon positif dari satuan pendidikan. Hal ini dibuktikan dari satuan pendidikan yang telah mengimplementasikan permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 yaitu pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Satuan Tugas. Selama tahun 2023, dari 437.722 satuan pendidikan jenjang paud, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di seluruh Indonesia telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebanyak 234.715 satuan pendidikan. Selain itu, dari 38 Provinsi di seluruh Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Provinsi sebanyak 5 Satgas Provinsi, dan dari 514 kabupaten/kota telah membentuk Satuan Tugas Kabupaten/Kota sebanyak 62 kabupaten/kota.

Ketercapaian pada target ini dimungkinkan karena terbitnya Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Terbitnya permendikbudristek tersebut mendapatkan respon positif dari satuan pendidikan dan melakukan tindak lanjut dengan menyebarkan materi permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 serta membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Satuan Tugas.

Selain itu, kegiatan yang dilakukan secara *hybrid* merupakan salah satu efisiensi yang dilakukan Pusat Penguatan

Karakter sehingga perwakilan

Tabel 2. 6 jumlah satuan Pendidikan yang membentuk TPPK

No.	Jenjang	Jumlah	
		Sekolah	TPPK
1.	PAUD	203,385	89,820
2.	PKBM	10,100	2,594
3.	SD	149,344	94,672
4.	SKB	496	186
5.	SLB	2,332	1,289
6.	SMP	43,025	27,326
7.	SMA	14,595	10,060
8.	SMK	14,445	8,768
TOTAL		437,722	234,715

Sumber: Dasbor Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Satgas Kabupaten-Kota Provinsi (31 Desember 2023)

Tabel 3.2 jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang membentuk Satgas PPKSP

No.	Provinsi/ Kabupaten Kota	Jumlah	
		Provinsi/ Kabupaten Kota	Satgas
1.	Provinsi	38	5
2.	Kabupaten/ Kota	514	62

Sumber: Dasbor Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Satgas Kabupaten-Kota Provinsi (31 Desember 2023)

Ketercapaian ini dimungkinkan karena program ini dijalankan pada pertengahan tahun 2023. Hal ini dapat diyakini bahwa pada tahun 2024 seluruh satuan pendidikan telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Satuan Tugas sesuai dengan tenggat waktu yang tercantum pada permendikbudristek tersebut.



Untuk program 3 dosa besar pendidikan seperti anti kekerasan seksual, seluruh Perguruan Tinggi Negeri telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dengan jumlah 76 PTN Akademik dan 49 PTN Vokasi, serta telah melaksanakan Peningkatan Kapasitas Satgas PPKS. Ketercapaian ini menandakan bahwa seluruh Perguruan Tinggi Negeri telah berkomitmen dengan baik dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi yang selaras dengan amanat dari Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021.

Selain itu, pada program anti perundungan, sebanyak 3.353 sekolah dan 6.303 fasilitator guru di seluruh Indonesia telah mengikuti bimbingan teknis program roots, dengan rincian 1.941 sekolah dan 3.684 fasilitator guru SMP, 739 sekolah dan 1.409 fasilitator guru SMA, dan 673 sekolah dan 1.209 fasilitator guru SMK. Capaian sasaran sekolah telah melampaui target yang mana target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebanyak 2.750 pada jenjang SMP, SMA, dan SMK.



Selanjutnya, pada program diseminasi produk kebinekaan, Pusat Penguatan Karakter telah melakukan sosialisasi pada 9 daerah prioritas yang iklim kebinekaannya perlu ditingkatkan lagi. Berikut daerah prioritas di samping:

No.	Daerah Prioritas Diseminasi
1.	Aceh
2.	Sumatera Utara
3.	Sumatera Selatan
4.	Banten
5.	Jawa Barat
6.	Jawa Timur
7.	Sulawesi Selatan
8.	Nusa Tenggara Barat
9.	Maluku Utara

Dari 9 provinsi yang menjadi sasaran kegiatan sosialisasi dan diseminasi produk kebinekaan bagi pemangku kepentingan pada tahun 2023, yaitu modul Wawasan Kebinekaan Global (WKG) bertopik kebinekaan, modul Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) bertopik kebinekaan, buku panduan PAUD untuk orang tua, buku aktivitas kreatif untuk guru, serta konten dan poster, terdapat usulan Rencana Tindak Lanjut untuk mendiseminasikan ke 6 produk tersebut dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan diseminasi yang sasarannya sejumlah 78.354 kepala sekolah/guru/pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, dalam rangka pendampingan untuk memonitoring rencana tersebut, maka Pusat Penguatan Karakter membuat Whatsapp Group per provinsi, membuat surat pemberitahuan Rencana Tindak Lanjut, dan melakukan reviu untuk mendapatkan informasi realisasi implementasi rencana tindak lanjut yang sudah dilakukan. Dari pendampingan tersebut, diketahui telah terealisasi sebanyak 23.038 kepala sekolah/guru/pemangku kepentingan lainnya yang mendapatkan diseminasi produk kebinekaan.



Cover buku Aktivitas Kreatif untuk guru

Program dan Kegiatan

Pusat Penguatan Karakter melaksanakan program/kegiatan untuk mendukung target kinerja Indikator Kinerja dengan melakukan berbagai program/kegiatan meliputi:

1. Menyiapkan kebijakan teknis terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) serta melaksanakan peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-25: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
 - bahwa untuk melaksanakan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang mempertimbangkan hak peserta didik dalam memperoleh lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya;
 - bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan tidak sesuai lagi

Gambar 3. 11 peluncuran Merdeka belajar episode 25

- Menyampaikan materi kebijakan penguatan karakter terkait penuntasan tiga dosa pendidikan dilanjutkan dengan advokasi dan pendampingan pengisian instrumen pengukuran capaian implementasi penguatan karakter terkait Tiga Dosa Besar Pendidikan.



Gambar 3. 12 Pendampingan pengisian instrumen pengukuran capaian implementasi penguatan karakter terkait Tiga Dosa Besar Pendidikan

- Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antar satuan kerja, Kementerian/Lembaga terkait 3 Dosa Besar Pendidikan.
- Mengembangkan modul terkait PPKSP dan melaksanakan peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan di wilayah Indonesia bagian timur, tengah, dan barat, antara lain Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kemendikbudristek di daerah, Dinas Pendidikan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS jenjang SMP, SMA, dan SMK), Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar (K3SD), dan Kelompok Kerja Kepala Taman Kanak-Kanak (K3TK) Ibu Penggerak, dan Komunitas Guru Mitra Kemendikbudristek.



Gambar 3. 13 kegiatan peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan terkait PPKSP

5. Memperkuat aktivasi konten berupa pelaksanaan webinar Kelas Akhir Pekan Episode Pembentukan TPPK dan Satgas, serta gelar wicara (*talkshow*) 16 Hari Anti Kekerasan dalam rangkaian Pekan Untuk Sahabat Karakter (PUSAKA)



Gambar 3. 14 aktivasi konten tutorial pelaporan pembentukan TPPK dan Satgas PPKSP

6. Pemberian Apresiasi Cerdas Berkarakter terkait penuntasan 3 dosa besar pendidikan kepada pemerintah daerah yang paling berkomitmen mengimplementasikan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, serta mendorong optimalisasi kebijakan PPKSP.



Gambar 3. 15 pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah yang paling berkomitmen dalam pengimplementasian PPKSP

7. Terkait isu kekerasan seksual, PUSPEKA melaksanakan:
 - a. Koordinasi, fasilitasi, dan sosialisasi materi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) dalam rangka implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS), melalui Bincang Siang Satgas PPKS dan aktivasi-aktivasi yang diselenggarakan oleh Eselon I/II di lingkungan Kemendikbudristek (Inspektorat Jenderal; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; Direktorat Pendidikan Profesi Guru, dll), LLDikti, Perguruan Tinggi, dan jaringan masyarakat.
 - b. Pengembangan Portal PPKS dan Modul Pembelajaran PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 - c. *Training of Trainer (ToT)* Fasilitator Nasional Peningkatan Kapasitas Satuan Tugas (Satgas) PPKS di Perguruan Tinggi



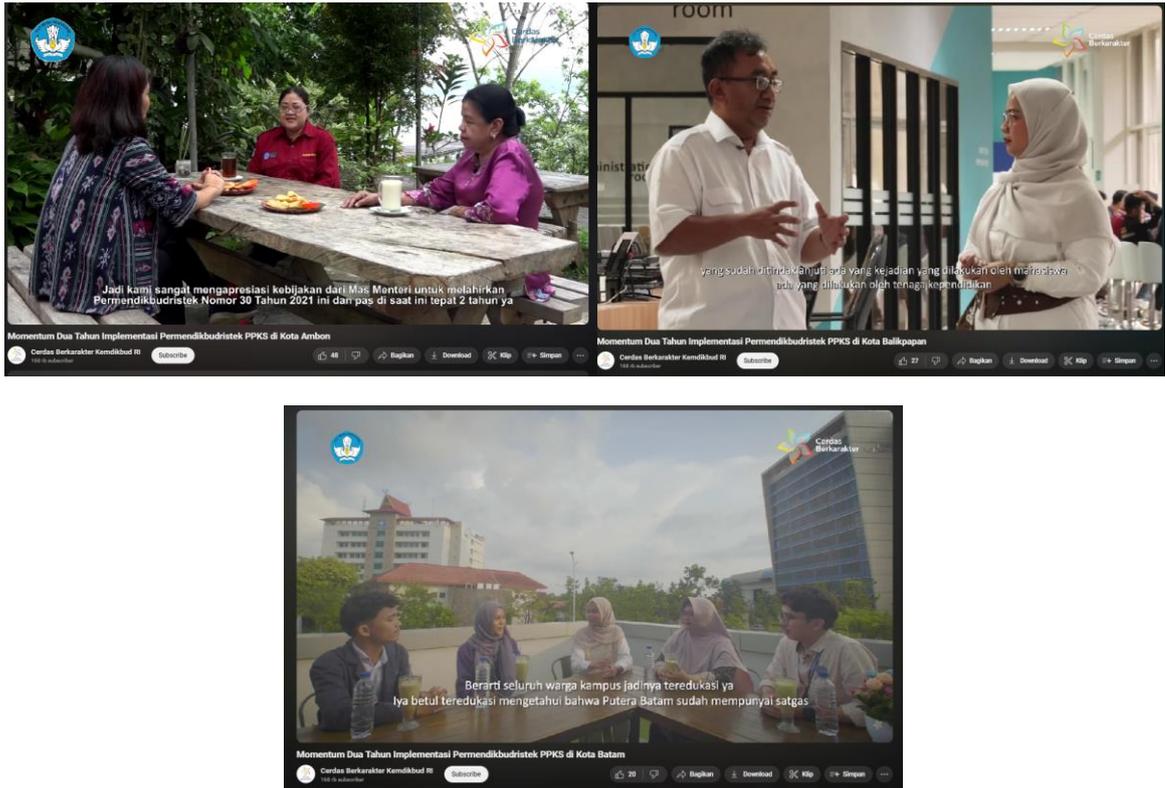
Gambar 3. 16 pelaksanaan Training of Trainer (ToT) Fasilitator Nasional

- d. Peningkatan Kapasitas Satgas PPKS di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yang dilaksanakan di 4 region yaitu Region I (Sumatera), Region II (Jawa bagian barat dan Kalimantan), Region III (Jawa bagian tengah dan timur, serta Bali), dan Region IV (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)



Gambar 3. 17 pelaksanaan peningkatan kapasitas satgas PPKS

- e. Kolaborasi produksi konten dengan 3 Perguruan Tinggi Negeri yaitu Politeknik Negeri Batam, Universitas Pattimura, dan Institut Teknologi Kalimantan dalam rangka memperingati 2 tahun Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021



Gambar 3. 18 aktivasi konten momentum 2 tahun permendikbudristek nomor 30 tahun 2021

- f. Aktivasi kreativitas Pameran, Obrolan, dan Diskusi Kekerasan Seksual (POD.KeS) sebagai salah satu bentuk kampanye dalam mencegah Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.



Gambar 3. 19 Aktivasi Pameran, Obrolan, dan Diskusi Kekerasan Seksual (POD.Ks)

- g. Integrasi Modul Pencegahan Kekerasan Seksual jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK dengan Platform Merdeka Mengajar.
9. Terkait isu anti perundungan, PUSPEKA melaksanakan:
- a. Sosialisasi Program Pencegahan dan Penanganan Perundungan tahun 2023 bagi Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kepala Sekolah;
 - b. Bimbingan teknis program anti perundungan (*roots*) dengan sasaran bimtek dilakukan di 34 provinsi.



Gambar 3. 20 pelaksanaan bimtek *roots*

- c. Penyusunan Modul Digitalisasi Pencegahan Perundungan Roots untuk Platform Merdeka Mengajar (PMM);
- d. Digitalisasi Program Pencegahan Perundungan dengan topik “Ayo Atasi Perundungan” melalui Platform Merdeka Mengajar;
- e. Aktivasi Panggung Apresiasi dan Berbagi Praktik Baik Program *Roots* Indonesia tahun 2023;



Gambar 3. 21 aktivasi panggung apresiasi dan berbagi praktik baik Program *Roots*

- f. Penyiapan Panduan Kolaborasi Kampanye Digital Peringatan Hari Internasional Anti Kekerasan dan Perundungan di Sekolah;

- g. Aktivasi Konten : “Panggung Apresiasi dan Berbagi Praktik Baik Program Roots Indonesia” dalam rangka memperingati *International Stand Up to Bullying Day*.
- h. Kampanye publik Lokakarya Sehat Mental Tanpa Perundungan.



Gambar 3. 23 aktivasi konten anti perundungan



Gambar 3. 22 pelaksanaan webinar sehat mental tanpa perundungan

- i. Aktivasi konten Hari Roots Nasional dalam memperingati Hari Anak Sedunia.



Gambar 3. 24 aktivasi konten Hari roots Nasional

10. Terkait isu intoleransi, PUSPEKA melaksanakan:

1. Produksi dan Penyebarluasan Konten Pencegahan Intoleransi dan Penguatan Kebinekaan yang diawali dengan identifikasi dan perumusan isu guna mendapatkan rumah pesan dengan melibatkan pemangku kepentingan baik internal Kemendikbudristek maupun eksternal, seperti Jaringan Masyarakat Sipil (JMS).



Gambar 3. 25 Aktivasi konten kebinekaan

2. Sosialisasi produk kebinekaan sekaligus advokasi dan pendampingan pada daerah prioritas yang iklim kebinekaannya perlu ditingkatkan.



Gambar 3. 26 pelaksanaan Sosialisasi produk kebinekaan

3. Koordinasi tindak lanjut implementasi produk kebinekaan
4. Aktivasi konten berupa Webinar Diskusi Praktik Baik Belajar Kebinekaan.



Gambar 3. 27 aktivasi konten webinar praktik baik belajar kebinekaan

5. Aktivasi Kampanye "1Juta Kampanye Toleransi" dengan melibatkan dan memberdayakan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka Hari Toleransi Internasional



Gambar 3. 28 aktivasi kampanye 1 juta kampanye toleransi

6. Penyebarluasan penggunaan Modul Wawasan Kebinekaan Global (WKG) di Platform Merdeka Mengajar
7. Pengembangan Laman Pencegahan Intoleransi.



Gambar 3. 29 laman pencegahan intoleransi

Faktor Keberhasilan

Adapun faktor keberhasilan pada pencapaian target Indikator Kinerja:

Kekerasan Seksual:

1. Mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait berbagai regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi
2. Meningkatnya pemahaman terkait materi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)
3. Pemanfaatan Portal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengakses materi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Perundungan:

1. Melakukan komunikasi lebih intensif agar perwakilan sekolah dapat hadir;
2. Beberapa daerah memiliki inisiatif melaksanakan bimtek roots secara mandiri dan bekerja sama dengan Puspeka;
3. pelaksanaan bimtek roots dilakukan secara daring dan luring;
4. melakukan pendampingan rencana tindak lanjut pasca bimtek program anti perundungan dan melibatkan para fasilitator nasional dari seluruh provinsi.

Intoleransi:

1. Produk kebinekaan yg disosialisasikan sangat sesuai dengan kebutuhan lapangan untuk meningkatkan iklim kebinekaan dalam rapor pendidikan.
2. hasil dari Sosialisasi dan Diseminasi Produk Kebinekaan bagi Pemangku Kepentingan di daerah prioritas yang berupa RTL terus didampingi pelaksanaannya, baik melalui WA Grup, surat pemberitahuan dan rapat koordinasi secara daring.
3. Webinar Forum Penguatan Kebinekaan selalu menyediakan narasumber orang-orang yang populer dan ahli dalam bidangnya, sehingga adanya ketertarikan dari masyarakat yang memang ingin mengikuti kegiatan Webinar ini.
4. Aktivasi Hari Toleransi Internasional berhasil walau waktunya hanya seminggu, salah satunya strateginya adalah penggunaan akun sendiri untuk bisa melakukan sosialisasi, publikasi, dan menarik masyarakat. Selain itu kerjasama dengan JMS-JMS yang peduli pendidikan juga dilakukan dengan sebaik mungkin, untuk mengkampanyekan Hari Toleransi Internasional dengan memproduksi konten praktik baik toleransi dan mempublikasikannya di akun Cerdas Berkarakter dan akun media sosial lainnya yang berpotensi akan meningkatkan jangkauan/reach.

5. Diseminasi modul WKG melalui Platform Merdeka Mengajar efektif, karena Guru bisa dengan mudah akses, dalam waktu 1 tahun sudah berhasil mencapai 46 ribu guru yang akses.

Analisis Hambatan dan Permasalahan

Kekerasan seksual:

1. Isu Kekerasan Seksual cukup sensitif, sehingga dapat memicu respon emosional ketika pemaparan materi
2. Masih ada beberapa tim Satgas yang tidak mengirimkan proporsi perwakilannya dengan lengkap (hanya mengirimkan 1 perwakilan, tidak lengkap tendik, dosen, dan mahasiswa)
3. Waktu Pameran, Obrolan, dan Diskusi yang dilaksanakan di Galeri Nasional terlalu terbatas, sementara pengunjung sangat antusias berdatangan
4. Penyempurnaan Portal PPKS membutuhkan waktu yang relatif lama

Perundungan:

1. Masih banyak sekolah yang tidak mengirimkan perwakilan fasilitator guru untuk mengikuti Bimtek Anti Perundungan;
2. Masih ada Fasilitator Guru yang belum melaksanakan rencana tindak lanjut yang sudah ditetapkan pada saat Bimtek Anti Perundungan;
3. adanya berbagai masukan untuk modul dan konsep program pencegahan perundungan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama
4. Selama pendampingan program roots, beberapa sekolah kurang responsif dalam menyampaikan hasil capaian/tindak lanjut yang telah dilakukan
5. Beberapa fasilitator nasional kurang aktif dalam mendorong wilayahnya untuk melaksanakan Program Roots
6. Kolaborasi aktivasi media sosial bersama mitra terkendala dalam perbedaan desain konten, seringkali tidak ada kesepakatan finalnya.
7. Penyusunan ide konten yang melibatkan peserta didik sulit dalam memilih waktu yang tepat untuk pertemuan.

Intoleransi:

1. Masih belum tingginya capaian dari konten-konten pencegahan intoleransi dan penguatan kebinekaan yang sudah dibuat.
2. Masih ada perwakilan daerah yang tidak hadir pada diseminasi produk kebinekaan
3. Masih ada daerah yang belum mengimplementasi usulan Rencana Tindak Lanjut diseminasi produk kebinekaan.
4. Perlu ada sebuah strategi untuk meningkatkan capaian dari Webinar Penguatan Kebinekaan, baik dari narasumber yang menarik, menarik segmen atau sasaran

yang akan mengikuti webinar, dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang akan menjadikan webinar lebih luas dan mengena jangkauannya. Selain itu, bisa juga dilakukan secara hybrid atau lainnya dengan memperhatikan efektifitasnya.

5. Dalam aktivasi Hari Toleransi Internasional dilaksanakan dengan waktu yang singkat. Walaupun sudah terproduksi 260 konten penguatan toleransi dan capaian kurang lebih 400 ribu. Ini akan lebih besar lagi jika waktunya lebih lama dan dengan pendekatan kegiatan-kegiatan kreatif lainnya.
6. Pada implementasi Modul Wawasan Kebinekaan Global (WKG) pada Platform Merdeka Mengajar, beberapa masih ada yang belum melakukan aksi nyata, sehingga perlu dilihat kesulitan dalam melaksanakan aksi nyata tersebut. Selain itu, tidak adanya kejelasan periode waktu untuk mendapatkan sertifikat setelah melakukan pengunggahan aksi nyata.
7. Belum tersedianya SOP akses laman kebinekaan dari Tim anti intoleransi untuk melihat perkembangan dan pengisian laman kebinekaan tersebut.

Analisis Antisipasi dan Strategis

Kekerasan Seksual:

1. Memberikan peringatan pemicu (disclaimer) di awal penyampaian materi
2. Proporsi perwakilan digantikan dengan unsur lainnya dengan tetap mengutamakan satgas
3. Kolaborasi dengan Satgas dan Jaringan Masyarakat Sipil untuk mengirimkan karya yang akan dipamerkan dan menambah hari pelaksanaan pameran
4. Adanya masukan dan perlunya koordinasi dengan berbagai pihak untuk penyempurnaan Portal PPKS namun tetap tercapai sesuai target waktu yang ditetapkan

Perundungan:

1. Menghubungi pihak-pihak terkait dari Dinas Pendidikan maupun Kepala Sekolah agar dapat mengirimkan Fasilitator Guru yang dapat mengikuti Bimtek Anti Perundungan;
2. Melakukan pendampingan secara terus menerus kepada Fasilitator Guru yang masih kesulitan dalam pemahaman saat Bimtek dan melakukan rencana tindak lanjut dari Bimtek Anti Perundungan
3. Perlu melibatkan berbagai pihak seperti para fasilitator nasional, direktorat paudnasmen untuk mendiskusikan konten dari modul serta konsep program pencegahan perundungan baik secara daring maupun luring untuk mempercepat proses finalisasi modul dan konsep program pencegahan perundungan
4. Melakukan koordinasi secara intensif dengan para fasilitator nasional untuk mendorong wilayahnya untuk melaksanakan program roots

Intoleransi:

1. Dalam produksi konten sebisa mungkin dibuat oleh PH yang berkolaborasi dengan JMS atau mitra lain;
2. melakukan kolaborasi dalam penyebarluasan konten, khususnya konten-konten yang sudah diproduksi saat ini, disesuaikan dengan waktu dan event yang terjadi;
3. Menghubungi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dari Dinas Pendidikan secara terus menerus agar dapat mengikuti kegiatan tindak lanjut Sosialisasi dan Diseminasi Produk Kebinekaan sehingga didapatkan hasil yang diharapkan;
4. Perlu ada advokasi terhadap daerah-daerah yang mengingat masih banyak yang belum mengimplementasikan usulan Rencana Tindak Lanjut produk kebinekaan, bisa melakukan *Forum Group Discussion* untuk mendapatkan isu atau permasalahan yang dihadapi sekaligus solusi yang bisa dilakukan;
5. Perlu diperpanjang waktunya dan ditambahkan dengan kegiatan-kegiatan kreatif yang menarik;
6. Pemilihan narasumber/talent yang sesuai pada bidang dan tema yang sudah ditentukan untuk menghasilkan konten/talkshow intoleransi sesuai hasil yang diharapkan;
7. Waktu validasi dari Aksi Nyata ke Selesai Pelatihan belum ada SOP atau pembatasan waktu yang jelas, sehingga perlu ada SOP-nya. Bisa juga "Aksi Nyata-nya" dibuat menarik sehingga setiap orang akan melakukan aksi nyata.
8. Koordinasi dengan tim untuk menyusun SOP akses laman kebinekaan.

Indikator Kinerja Kegiatan 1.3

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau lebih populernya dikenal dengan kesetaraan gender menjadi isu penting yang disorot di tingkat nasional maupun dunia internasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud komitmen dalam menurunkan kesenjangan gender. Tahun 2000, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.

Diskriminasi tidak hanya terjadi berbasis gender tetapi dialami juga oleh orang dengan disabilitas. Komnas Perempuan mencatat bahwa indeks inklusivitas Indonesia terbelah rendah pada jenjang dunia maupun kawasan ASEAN. Indeks inklusivitas adalah ukuran holistik dari pembangunan inklusif yang berfokus pada kesetaraan ras, etnik, gender, agama dan disabilitas sebagai representasi politik, kekerasan di luar kelompok, ketimpangan pendapatan, tingkat penahanan serta kebijakan migrasi atau pengungsi.

Diskriminasi dalam pengambilan keputusan berdampak pada ketertinggalan perempuan dengan disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia serta berlanjutnya stereotip terkait gender maupun disabilitas yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Stereotip tersebut antara lain dapat dilihat dalam bentuk partisipasi perempuan disabilitas di dunia kerja. Data Badan Pusat Statistik per Agustus 2021 mencatat, proporsi jumlah perempuan disabilitas usia kerja lebih besar (9,32 juta atau 55%) daripada laki-laki usia kerja (7,62 juta atau 45%). Dari angka tersebut, penyandang disabilitas yang bekerja hanya 7,04 juta, sisanya pengangguran terbuka. Perempuan disabilitas yang masuk di dunia kerja lebih sedikit, 3,1 juta orang atau 42,7% sementara laki-laki sebanyak 57,3% atau sekitar 4,29 juta orang.

Metode perhitungan capaian IKK diperoleh dari jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ekosistem pendidikannya telah mendapatkan penguatan karakter terkait inklusivitas dan kebinekaan dan sumber data dari Laporan Pusat Penguatan Karakter dan Laporan dari provinsi dan kabupaten/kota.

Satuan	Provinsi/Kab/Kota
Tipe Penghitungan	Kumulatif
Unit Pelaksana	PUSPEKA
Sumber Data	Laporan PUSPEKA, Laporan Provinsi/Kabupaten/Kota
Polarisasi Indikator	Stabilize
Sumber Data	Triwulan

Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan

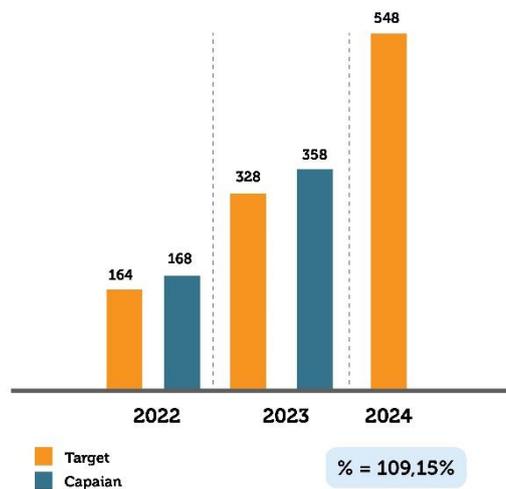


Diagram 3. 5 target dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.3 Puspeka

Pada akhir tahun 2023, jumlah provinsi kabupaten/kota yang mendapatkan materi tersebut sebanyak 180 daerah, sehingga Capaian IKK jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis

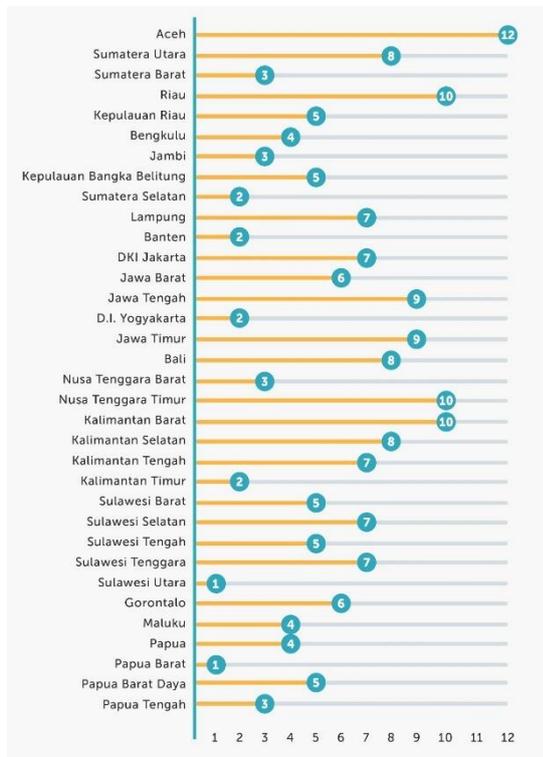


Diagram 3. 6 jumlah sebaran daerah yang mendapatkan materi Inklusivitas dan Kesetaraan Gender

inklusivitas tanpa batasan gender. Selain itu, kegiatan yang dilakukan secara *hybrid* merupakan salah satu efisiensi yang dilakukan Pusat Penguatan Karakter sehingga perwakilan daerah yang berhalangan hadir secara luring dapat menghadiri sosialisasi materi maupun melakukan pendampingan serta advokasi terkait materi toleransi beragama dan kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan berkebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan dan mampu melebihi target sebaran daerah.

Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PUSPEKA untuk mendukung realisasi target indikator, meliputi:

- a. Fasilitasi dan advokasi pengisian survei implementasi materi Inklusivitas dan kebinekaan
- b. Koordinasi lintas sektor terkait program inklusivitas dan kesetaraan gender dengan internal Kemdikbudristek, Kementerian/Lembaga, dan komunitas

pada ekosistem pendidikan per tanggal 31 Desember 2023 sebanyak 358 daerah atau setara dengan 109,15% dari target yang ditetapkan. Terdapat kenaikan dengan signifikan dari capaian tahun 2022. Pada tahun 2022, capaian jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait kesetaraan gender yakni 168 daerah, di tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 213%. Apabila dibandingkan dengan target Renstra di tahun 2024 maka ketercapaiannya sebesar 65,32%.

Ketercapaian ini dimungkinkan karena satuan pendidikan mendapatkan gambaran program dan kegiatan terkait inklusivitas (layanan anak berkebutuhan khusus dan cerdas berbakat istimewa) yang utuh dan komprehensif serta meningkatnya pemahaman pendidik, tenaga pendidik, orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan terhadap perwujudan iklim

- c. Penyusunan dan Penyebarluasan materi penguatan karakter terkait substansi Inklusivitas dan Kebinekaan berupa buku saku inklusivitas dan Kesetaraan Gender



Gambar 3. 30 pelaksanaan penyebarluasan materi Inklusivitas dan Kebinekaan

- d. Peringatan International Women Day Tahun 2023 untuk mendukung program SDG's goal nomor 5 gender equality, mendukung penguatan dan pemberdayaan perempuan secara nasional, berbagi praktik baik tentang perempuan yang berkarir di bidang ICT, mendorong terciptanya



lingkungan yang aman dan inklusif yang mengarusutamakan perspektif gender, dan membangun jejaring pada level nasional dan internasional

Gambar 3. 31 infografis pelaksanaan webinar hari Perempuan internasional

- e. Aktivasi Peringatan Hari Penyandang Disabilitas Internasional



Gambar 3. 32 aktivasi peringatan Hari Penyandang Disabilitas Internasional

- f. Aktivasi konten berupa talkshow Bincang Karakter tentang Inklusivitas dan Kebinekaan serta Kelas Akhir Pekan Belajar Bahasa Isyarat



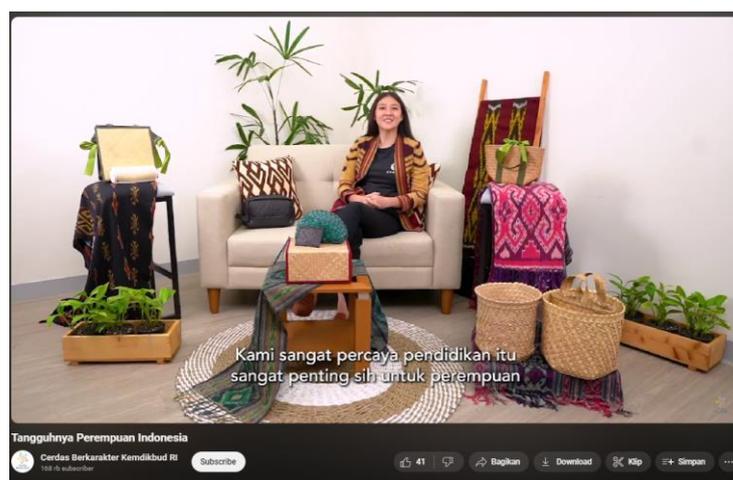
Gambar 3. 33 aktivasi konten Bahasa isyarat

- g. Produksi dan Penyebarluasan konten, diantaranya: "Peduli Autis Sedunia" yang; "Satu Kata Berjuta Makna" tentang peran perempuan dalam kehidupan; dan Hari Kesadaran Autisme.; dan Peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional.
- h. Produksi dan penyebarluasan konten Hari Kesadaran Autisme untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dukungan terhadap orang tua yang mempunyai anak autis



Gambar 3. 34 aktivasi konten Hari Kesadaran Autisme

- i. Produksi dan penyebarluasan Peringatan Hari Kartini mengangkat sosok Kartini modern untuk menginspirasi perempuan lainnya.



Gambar 3. 35 Aktivasi konten peringatan Hari Kartini

Faktor Keberhasilan

1. Mendapatkan gambaran program dan kegiatan terkait inklusivitas (layanan anak berkebutuhan khusus dan cerdas berbakat istimewa) yang utuh dan komprehensif

2. Meningkatnya pemahaman pendidik, tenaga pendidik, orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan terhadap perwujudan iklim inklusivitas tanpa batasan gender
3. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan advokasi kepada seluruh ekosistem pendidikan terkait perwujudan iklim inklusivitas tanpa batasan gender

Analisis Hambatan dan Permasalahan

1. Belum semua daerah yang hadir pada pendampingan pengisian survei implementasi materi Inklusivitas dan kebinekaan
2. Adanya masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan buku saku Inklusivitas dan Kesetaraan Gender sehingga membutuhkan waktu relatif lama;
3. Terbatasnya Narasumber/talent yang tepat untuk produksi konten/talkshow Inklusivitas;
4. Penyebarluasan buku saku inklusivitas dan kesetaraan gender masih terbatas di beberapa wilayah
5. Jangkauan aktivasi hari disabilitas internasional yang masih area Jabodetabek karena dilaksanakan secara luring
6. Banyaknya hari libur nasional pada bulan April- Juni membuat rencana program kerja sedikit bergeser dari jadwal yang ditetapkan;
7. Publikasi konten di media sosial kurang maksimal karena ada konten yang bertepatan dengan Hari Raya/Libur Nasional.

Langkah antisipasi dan strategi

1. Memberikan materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis yang bisa diakses oleh perwakilan dinas pendidikan melalui online dan dalam flashdisk, serta menyampaikan media sosial Puspeka yang dapat diakses oleh perwakilan dinas pendidikan yang diundang.
2. Melibatkan berbagai pihak dari seluruh satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK dan satuan pendidikan non formal sehingga Buku Saku banyak perbaikan yang perlu diperbaiki tetapi dapat tercapai tepat waktu sesuai yang direncanakan;
3. Pemilihan narasumber/talent yang sesuai pada bidang dan tema yang sudah ditentukan untuk menghasilkan konten/talkshow Inklusivitas sesuai hasil yang diharapkan;
4. Memprioritaskan sasaran wilayah dari hasil Asesmen Nasional untuk iklim inklusivitas dan data indeks pembangunan kesetaraan gender dari Badan Pusat Statistik yang masih rendah
5. Menayangkan siaran ulang di akun media sosial Puspeka sehingga masyarakat di luar Jabodetabek juga mendapatkan informasi dan advokasi

Indikator Kinerja Kegiatan 1.4

Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter

Pada Triwulan ke 3, KemenpanRB memberikan rekomendasi penambahan Indikator Kinerja Kegiatan yang berkomitmen terhadap penguatan karakter. Untuk indikator ini merupakan jumlah kabupaten kota yang berkomitmen dari 3 indikator sebelumnya, yaitu penerapan materi Profil Pelajar Pancasila, isu 3 dosa besar pendidikan, dan inklusivitas dan kebinekaan.

Perhitungan dari IKK ini diperoleh dari jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila, isu 3 dosa besar pendidikan, dan inklusivitas dan kebinekaan. Tipe perhitungan IKK ini adalah kumulatif. Indikator kegiatan pada jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan diukur dengan cara sebagai berikut:

Satuan	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota
Tipe Perhitungan	Kumulatif
Unit Pelaksana	Pusat Penguatan Karakter
Sumber Data	Laporan Pusat Penguatan Karakter dan Laporan dari provinsi dan kabupaten/kota
Polarisasi Indikator	Stabilize
Periode Pengumpulan Data	Per triwulan

Tabel 3.3 target dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.4 Puspeka

Kode	Uraian	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	%
IKK 1.4	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter ekosistem pendidikan	-	-	328	358	548	109,15



Diagram 3. 7 jumlah daerah sebaran yang berkomitmen terhadap penguatan karakter

Capaian IKK jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter sebanyak 358 daerah. Jumlah tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 328 daerah. Ketercapaian ini dikarenakan koordinasi yang baik dengan dinas pendidikan dalam pemenuhan dokumen regulasi dalam pengimplementasian penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila, Anti perundungan, Anti Kekerasan Seksual, Anti Intoleransi, dan Inklusivitas dan Kebinekaan.

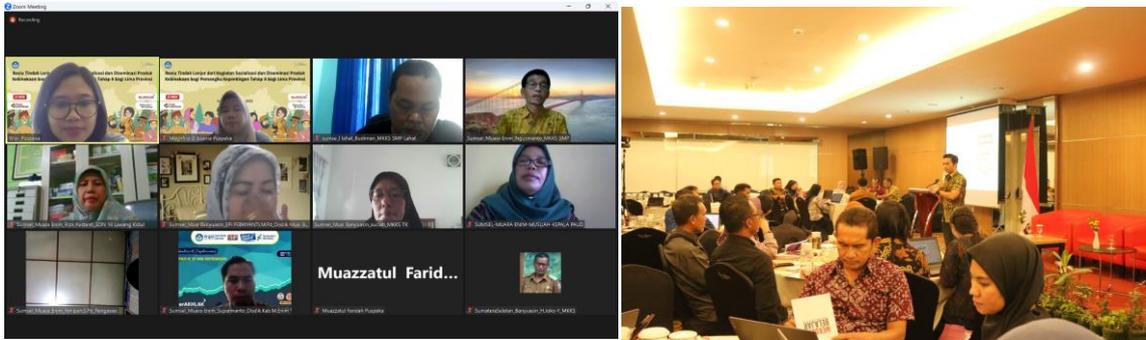
Adapun Provinsi Kabupaten/Kota yang berkomitmen dengan penguatan karakter yang dibuktikan dari tersedianya kebijakan di daerah:

 <p>BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR</p> <p>PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 27 TAHUN 2021</p> <p>TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SERTA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL DI KABUPATEN SIDOARJO</p>	<p style="text-align: center;">SURAT EDARAN Nomor : 733/1893/438.5.9/2022 TENTANG PENINGKATAN KEPEDULIAN TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN ANAK</p> <p>Sehubungan dengan cenderung meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, baik kekerasan yang bersifat fisik, psikis, seksual, penelantaran, maupun trafficking/perdagangan/pemanfaatan anak untuk kepentingan ekonomi atau seksual, yang dapat berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak. Untuk itu diminta kepada Saudara agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kepedulian di lingkungan masing-masing untuk berperan penuh dalam upaya perlindungan terhadap anak dari berbagai macam tindakan kekerasan; 2. Membentuk kelompok peduli perlindungan anak di lingkungan masing-masing sebagai upaya penjaminan perlindungan anak;
--	---

Gambar 3. 36 kebijakan penguatan pendidikan karakter

Program Kegiatan:

1. Pengolahan data dan evaluasi
2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Penguatan Karakter secara luring dan daring atas substansi terkait Profil Pelajar Pancasila, Anti Perundungan, Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, dan Inklusivitas Kebinekaan
3. Pelaksanaan kegiatan penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila
4. Melaksanakan kegiatan Penguatan Karakter terkait penuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan;
5. Melaksanakan kegiatan Penguatan Karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan;
6. Koordinasi rencana tindak lanjut pengimplementasian materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila, Penuntasan 3 dosa besar pendidikan, dan inklusivitas dan kebinekaan.



Gambar 3. 37 Koordinasi Rencana Tindak Lanjut implementasi penguatan karakter

Faktor Keberhasilan

1. Koordinasi yang baik dengan dinas pendidikan dalam pemenuhan dokumen regulasi dalam pengimplementasian penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila, Anti perundungan, Anti Kekerasan Seksual, Anti Intoleransi, dan Inklusivitas dan Kebinekaan
2. Adanya komitmen daerah sasaran untuk mengimplementasikan Rencana Tindak Lanjut materi penguatan karakter

Analisis Hambatan dan Permasalahan

1. Beberapa daerah belum memiliki rencana atau program penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila, penuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan, serta toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan

Antisipasi dan Strategi

1. Meminta daerah untuk menyampaikan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan daerah setelah mendapatkan materi Profil Pelajar Pancasila, penuntasan perundangan, kekerasan seksual, dan intoleransi, serta materi inklusivitas dan kesetaraan gender;
2. Mendorong daerah untuk membentuk Satgas PPKSP dan satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
3. Meminta perwakilan daerah mengisi lembar kerja beberapa program Puspeka untuk mengetahui penerapan Profil Pelajar Pancasila dan perwujudan inklusivitas kebinekaan yang telah dilakukan di satuan pendidikan/instansi masing-masing;

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter

Ketercapaian Sasaran Kinerja meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter ditandai dengan nilai SAKIP Pusat Penguatan Karakter pada Tahun 2023 sebesar 90,00 atau predikat A. Capaian ini cenderung naik dari tahun lalu, yang mana nilai SAKIP pada tahun 2022 sebesar 81,1 menjadi 90,00 di tahun 2023.

Selain itu Pusat Penguatan Karakter memperoleh realisasi Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L PUSPEKA sebesar 96,90 yang melebihi target sebesar 90,80. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, Pusat Penguatan Karakter meraih nilai 96,82 sehingga dari tahun 2022 ke tahun 2023 Nilai Kinerja Anggaran cenderung naik.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.1

Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29 Tahun 2014).

Menurut Perpres 29 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan:

1. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; adalah unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.
2. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; adalah instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon I.

3. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga; adalah unit kerja kementerian negara/lembaga yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat kementerian negara/Lembaga.

Selanjutnya, penyelenggaraan SAKIP mencakup:

1. Rencana Strategis;
2. Perjanjian Kinerja;
3. Pengukuran Kinerja;
4. Pengelolaan Data Kinerja;
5. Pelaporan Kinerja;
6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Ineterprestasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Nilai SAKIP didasarkan pada 4 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	30%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	25%
Total Nilai	100%

Nilai SAKIP = 30% (Perencanaan Kinerja) + 30% (Pengukuran Kinerja) + 15% (Pelaporan Kinerja) + 25% (Evaluasi Kinerja)

Satuan	Predikat
Tipe Penghitungan	Non kumulatif
Unit Pelaksana	PUSPEKA
Sumber Data	Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Tahunan

Pada tahun 2023, predikat SAKIP yang ditargetkan PUSPEKA minimal A (Memuaskan) dan pencapaian realisasinya mampu meraih predikat A (Memuaskan). Hal ini menunjukkan bahwa PUSPEKA mampu meningkatkan kinerja yang lebih baik, memperkuat sistem manajemen kinerja yang andal, dan kemauan mendukung upaya perubahan ke arah yang lebih baik.

Pada tahun 2022, PUSPEKA juga mendapatkan Predikat SAKIP A (Memuaskan) dan predikat SAKIP yang diraih PUSPEKA bertahan pada tahun 2023 di predikat A (Memuaskan). Dengan kata lain, perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal yang telah dilakukan oleh PUSPEKA sudah dilakukan dengan memuaskan.

Hingga akhir tahun 2024 PUSPEKA menargetkan untuk mendapatkan Predikat SAKIP A (Memuaskan), dan sudah terealisasi pada tahun 2023. Namun capaian tersebut harus dipertahankan untuk tetap ada di predikat A atau lebih ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.



Diagram 3. 8 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 Puspeka

Program/kegiatan yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja, antara lain dengan mengoptimalkan peran dan keterlibatan ketatausahaan di lingkungan PUSPEKA yang mencakup dari sisi:

1. Sinkronisasi Perencanaan Program Tahun Anggaran 2023
2. Koordinasi tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP
3. Penyampaian laporan triwulan dan semester secara berkala yang terdiri dari evaluasi kinerja, anggaran, maupun capaian IKK di lingkungan Pusat Penguatan Karakter
4. Reviu Prosedur Operasional Standar di lingkungan Pusat Penguatan Karakter
5. Pemenuhan dokumen ZI-WBK
6. Penyusunan dan revisi Perjanjian Kinerja dikarenakan penambahan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) atas rekomendasi oleh KemenpanRB
7. Pemenuhan dokumen SAKIP
8. Peningkatan kapasitas kearsipan di lingkungan Pusat Penguatan Karakter
9. Penyusunan dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) yang dimandatkan dari kementerian/lembaga lainnya

Faktor Keberhasilan

1. Pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan, perjanjian kinerja, dan memantau capaian kinerja secara berkala
2. kuatnya komitmen seluruh pegawai Pusat Penguatan Karakter dalam upaya mencapai kinerja SAKIP dengan predikat A yang ditunjukkan melalui penguatan koordinasi dan administrasi secara teratur dan berkala

Analisis hambatan dan permasalahan

1. Usulan perubahan/penambahan Indikator Kinerja Satker yang masih belum dipahami karena usulan dari hasil SAKIP Kementerian
2. Tim evaluator Itjen yang belum mengetahui setiap dokumen pendukung SAKIP yang ada pada aplikasi SPASIKITA

Strategi dalam rangka capaian kinerja PUSPEKA adalah dengan:

1. Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan, Kementerian MenpanRB serta pihak-pihak terkait untuk melakukan revisi Perjanjian Kinerja
2. Melakukan sanggah dan berkoordinasi kepada tim evaluator Itjen agar dokumen pendukung SAKIP dapat tersampaikan

Indikator Kegiatan 2.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L PUSPEKA minimal 85

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = [50\% \times \text{Nilai EKA}] + [50\% \times \text{Nilai IKPA}]$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA. Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Satuan	Nilai
Tipe Penghitungan	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	PUSPEKA
Sumber Data	SPASIKITA (Terintegrasi dengan Smart Dia)
Polarisasi Indikator	Maksimal
Sumber Data	Bulanan

Berikut rincian capaian kinerja berdasarkan masing-masing komponennya:

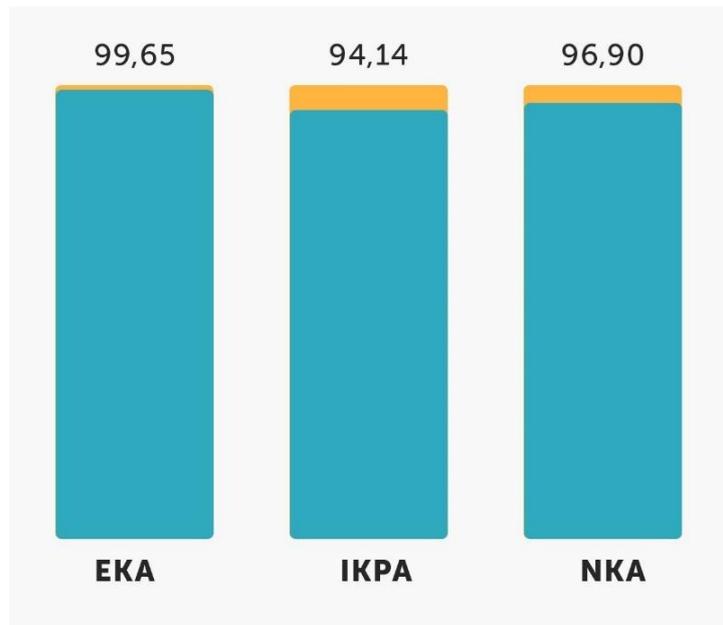


Diagram 3. 9 Nilai Kinerja Anggaran

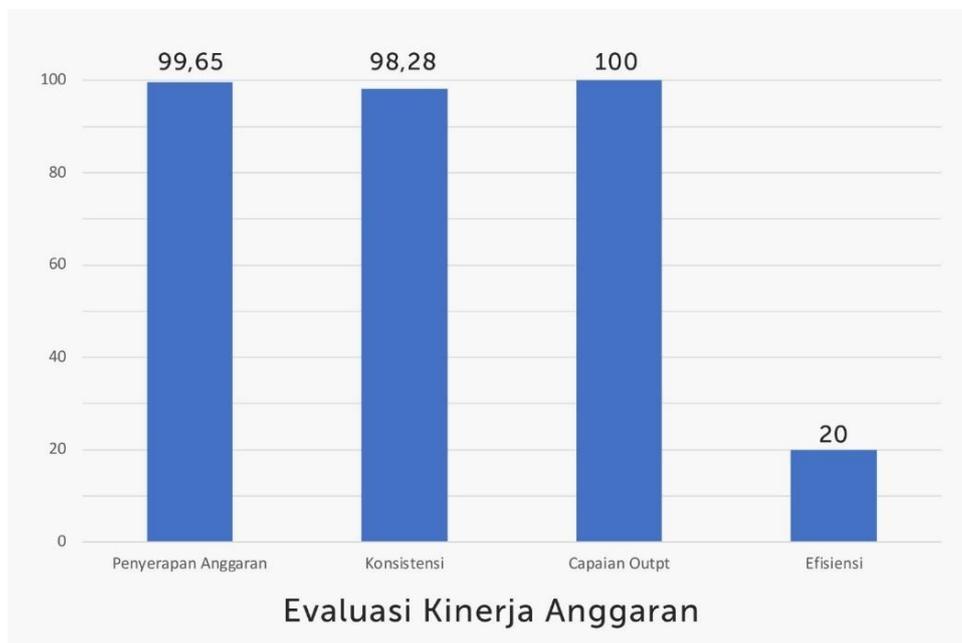


Diagram 3. 10 capaian EKA

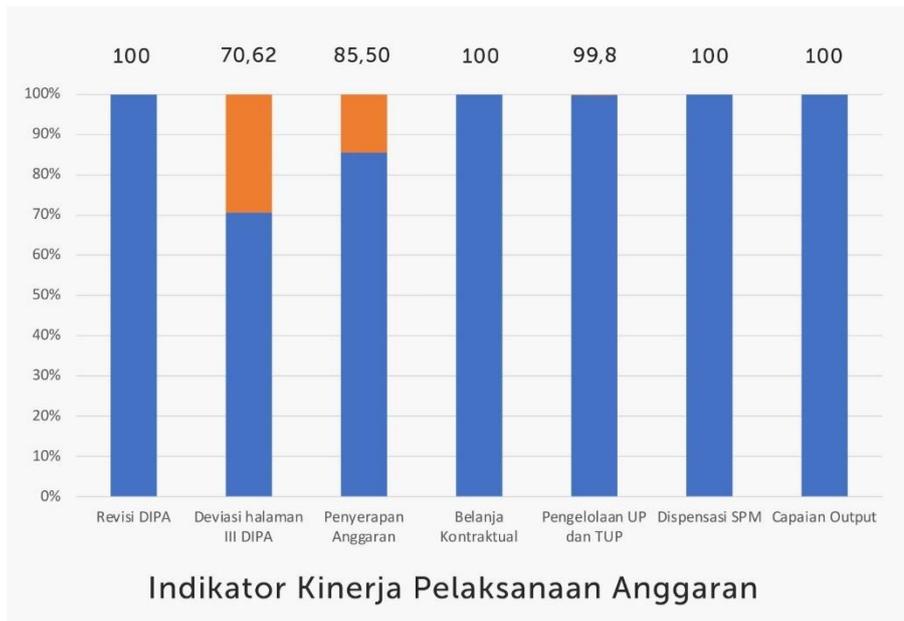


Diagram 3. 11 capaian IKPA

Capaian EKA dan IKPA PUSPEKA sebesar 99,65 dan 94,14. berdasarkan kedua capaian tersebut, maka Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 96,80. Capaian tersebut telah melampaui target dari renstra sebesar 90,45, sehingga ketercapaian pada realisasi sebesar 106,6%.



Diagram 3. 12 Indikator Kinerja Kegiatan 2.2 Puspeka

Untuk capaian Nilai Kinerja Anggaran, jika dibandingkan realisasi pada tahun 2022 cenderung meningkat di tahun 2023. Hal ini disebabkan karena PUSPEKA telah melakukan optimalisasi penyerapan anggaran dan secara konsisten merevisi sisa anggaran serta menjalankan anggaran mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian

Keuangan, sehingga hal ini menjadi faktor ketercapaian Nilai Kinerja Anggaran PUSPEKA saat ini.

Program dan Kegiatan

1. Pelaksanaan monitoring kinerja anggaran per triwulan, semester, dan tahunan di Lingkungan Pusat Penguatan Karakter
2. Pelaporan capaian output perbulanan melalui Spasikita
3. Sosialisasi optimalisasi NKA dari Biro Perencanaan
4. Melaksanakan pengelolaan anggaran secara konsisten dan tepat waktu untuk mempertahankan nilai pada komponen IKPA dan EKA tetap maksimal
5. Penyusunan Laporan Keuangan Satker Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan

Faktor keberhasilan pencapaian target indikator kinerja diantaranya:

- B. melakukan optimalisasi penyerapan anggaran dan secara konsisten merevisi sisa anggaran yang ada,
- C. melaporkan capaian output secara tepat waktu,
- D. menjaga konsistensi komponen yang ada pada IKPA agar tetap mendapatkan nilai maksimal
- E. Dalam menjalankan anggaran mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan

Analisis Hambatan dan Permasalahan

1. Penyerapan anggaran yang belum konsisten karena adanya perubahan jadwal kegiatan yang tidak sesuai rencana Triwulanan karena ada penyesuaian kebijakan program prioritas, sehingga terdapat deviasi antara penyerapan terhadap rencana penarikan dana.

Langkah antisipasi dan strategi

1. Mengantisipasi kebijakan program prioritas terhadap penyesuaian penyerapan anggaran;
2. Melakukan revisi target penyerapan pada DIPA
3. Melakukan optimalisasi Nilai Kinerja Anggaran dengan cara mengoptimalkan capaian-capaian indikator yang lain pada IKPA dan EKA salah satunya dengan melaksanakan dan melaporkan capaian output berupa Rencana Aksi Nasional dari berbagai K/L lainnya
4. Melakukan evaluasi jadwal kegiatan secara berkala

B. Realisasi Anggaran

Capaian Anggaran

Pagu anggaran PUSPEKA pada DIPA awal tahun 2023 sebesar Rp 64.689.968.000 . Setelah terjadinya *automatic adjustment*, pagu PUSPEKA menjadi Rp63.394.208.000. Dari pagu anggaran tersebut terserap sebesar Rp63.172.637.288 dengan persentase daya serap sebesar 99,65%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 6 (enam) indikator kinerja kegiatan. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

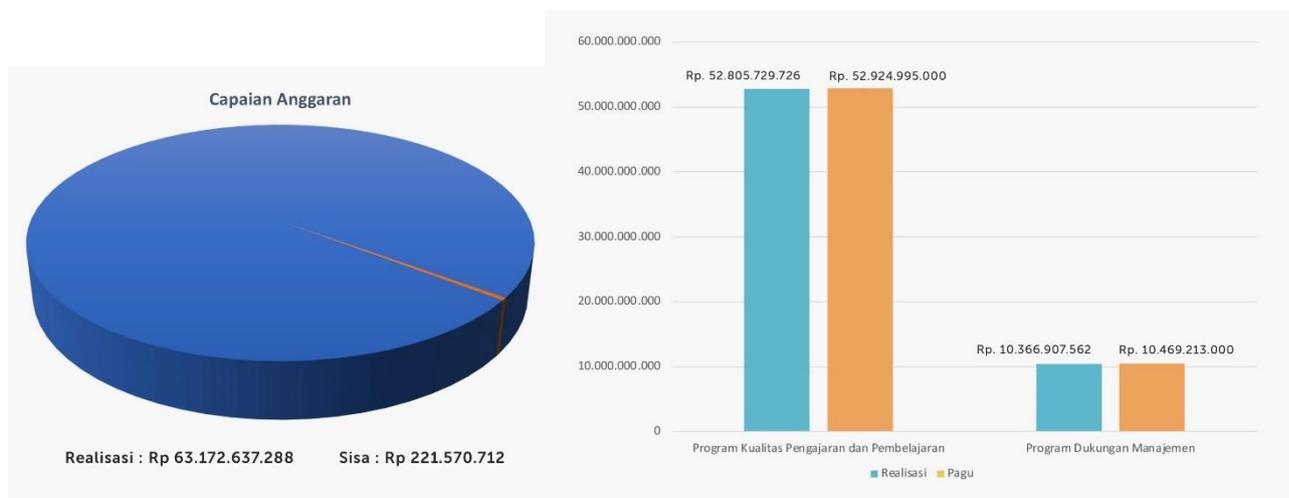
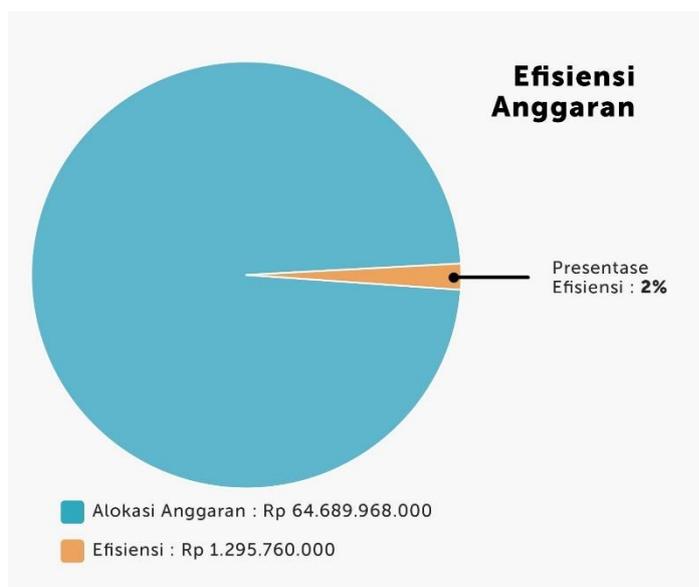


Diagram 3.13 realisasi anggaran

Efisiensi Anggaran



Pada tahun 2023, PUSPEKA berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 2% atau Rp1.295.760.000 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp64.689.968.000 (Enam puluh empat milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Efisiensi anggaran berdasarkan hal berikut:

1. Efisiensi anggaran berdasarkan *Automatic Adjustment* yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dilakukan dengan memindah alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas;
2. Puspeka telah melakukan efisiensi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan media rapat secara daring sehingga dapat terlaksana dengan sasaran melebihi target;
 - b. Perubahan tempat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di berbagai wilayah, hal tersebut bagian dari efisiensi paket meeting yang sebelumnya akan dilaksanakan di hotel menjadi dilaksanakan di UPT Kemendikbudristek;
 - c. Pengurangan volume hari untuk beberapa kegiatan agar dapat menjangkau seluruh target wilayah sebaran.

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

1. Inovasi

Pada tahun 2023, PUSPEKA melakukan inovasi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Pegawai terkait Pencegahan Tiga Isu Kekerasan Di Lingkungan Kemendikbudristek.

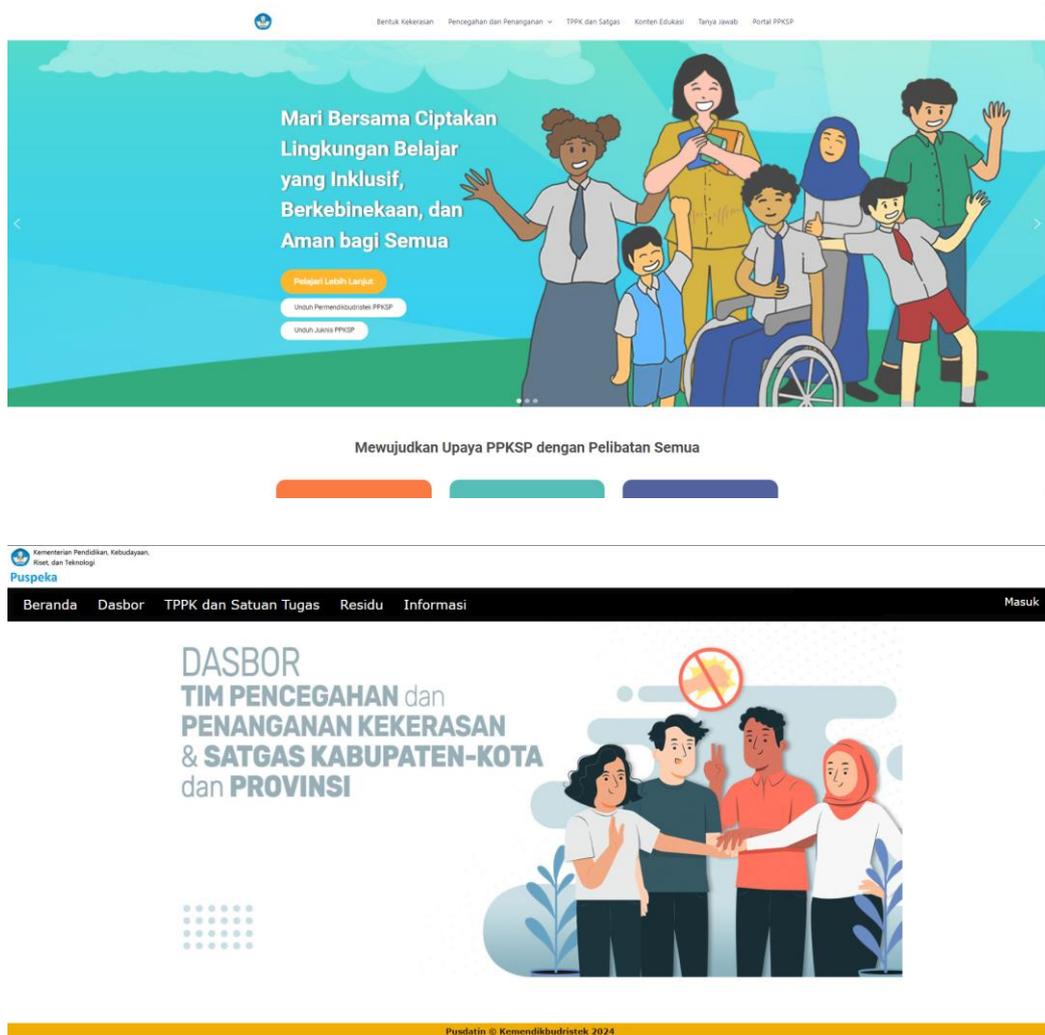
Pusat Penguatan Karakter melaksanakan Pelatihan peningkatan kapasitas Pegawai di lingkungan Kemendikbudristek melalui Winata Kinarya Merdeka Belajar Terkait Pencegahan Tiga Isu Kekerasan Di Lingkungan Kemendikbudristek. Sosialisasi terkait pencegahan tiga isu kekerasan tidak hanya di sosialisasikan kepada satuan pendidikan maupun masyarakat, tetapi pegawai di lingkungan kemendikbudristek perlu menerima materi tersebut supaya pegawai memiliki pemahaman yang baik tentang pencegahan tiga isu kekerasan. Pusat Penguatan Karakter berkolaborasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dalam mengembangkan platform Winata Kinerya Merdeka Belajar (WKMB) untuk melakukan sosialisasi tersebut melalui moda daring.



Gambar 3. 38 laman WKMB

2. Pengembangan Laman dan Portal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP)

Pengembangan laman ini dilatarbelakangi oleh Peluncuran Merdeka Belajar Episode Ke-25 terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Pada laman ini merupakan sebagai wadah dalam mengakses materi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Pengembangan laman ini bertujuan untuk memudahkan satuan pendidikan dalam mengakses materi tersebut dan diharapkan dapat dengan mudah tersosialisasikannya materi pencegahan dan penanganan kekerasan tersebut. Selain itu, terdapat Portal PPKSP yang merupakan suatu kanal untuk mengunggah Surat Keputusan jika satuan pendidikan sudah membentuk keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Selain itu, pada dashboard ini berfungsi untuk memantau satuan pendidikan dalam berpartisipasi dalam kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Pada pengembangan portal tersebut diharapkan dapat tersosialisasi ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia dan dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.



Gambar 3. 39 portal PPKSP

2. Penghargaan

Pada tahun 2023, PUSPEKA mendapatkan beberapa penghargaan, antara lain:

1. Satker ZI WBK 2023 dari Mendikbudristek
2. Pusat Penguatan Karakter mendapatkan hasil pengukuran nasional Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2023 oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada kebijakan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dengan predikat "Sangat Baik" atau nilai IKK 86,19.

Nomor : 7/D.1.2/HKM.02.2
 Sifat : Biasa
 Lampiran :
 Hal : Penyampaian Hasil Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023
 Jakarta, 3 Januari 2024

Yth. Plt. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana,
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 di
 Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan pengukuran nasional Indeks Kualitas Kebijakan atau IKK tahun 2023 oleh Lembaga Administrasi Negara sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pengukuran IKK tahun 2023 menggunakan instrumen IKK yang tertuang dalam Surat Edaran LAN Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan dan Surat Kepala LAN Nomor 2379/K.1/PEP.07 tanggal 10 Juli 2023 hal Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 2023.
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah berpartisipasi dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2023 dengan objek pengukuran pada 6 (enam) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terpilih dalam sistem informasi IKK.
3. Berdasarkan validasi akhir Tim Nasional IKK dan *Board Member Meeting* IKK terhadap hasil *self assessment* kebijakan yang menjadi objek pengukuran IKK oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 diperoleh hasil penilaian yaitu:

No	Nama Kebijakan	IKK*	Kategori
1	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional	80.90	Sangat Baik
2	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi	86.19	Sangat Baik
3	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah	75.85	Baik

3. Puspeka dipercaya mewakili Mendikbudristek untuk menjadi *Keynote Speaker* pada acara *International Symposium "Violence in Schools: Knowledge, Policies, and Practice"* terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

3. Program *Crosscutting / Collaborative*

Pada tahun 2023, Puspeka dalam memenuhi target capaian kinerja melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, antara lain:

1. Pada tahun 2023, Kemendikbudristek meluncurkan Merdeka Belajar Episode ke-25, yaitu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Pada peluncuran regulasi ini, Kemendikbudristek berkolaborasi dengan beberapa Kementerian/Lembaga dalam menandatangani nota kesepahaman bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas HAM, dan Komnas Disabilitas. Pusat Penguatan Karakter berperan diantaranya menyusun regulasi bersama pihak-pihak terkait, menyusun pedoman teknis, materi, hingga pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Satgas. Dampak dari program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua;

BAB IV

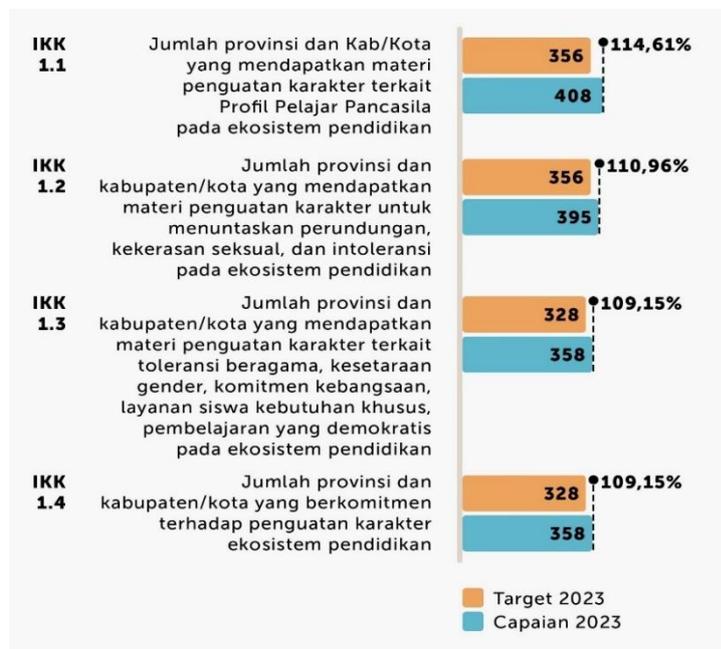
Penutup

A. Kesimpulan

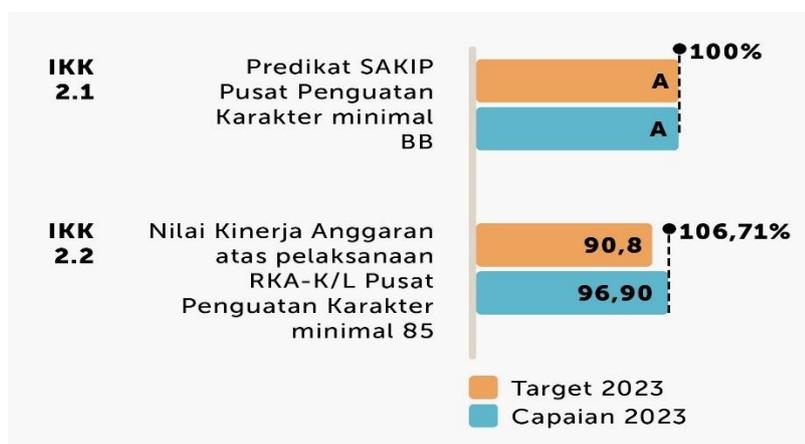
Selama tahun 2023, Pusat Penguatan Karakter berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan yang terdiri dari dua (2) Sasaran Kegiatan dengan enam (6) Indikator Kinerja Kegiatan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan:

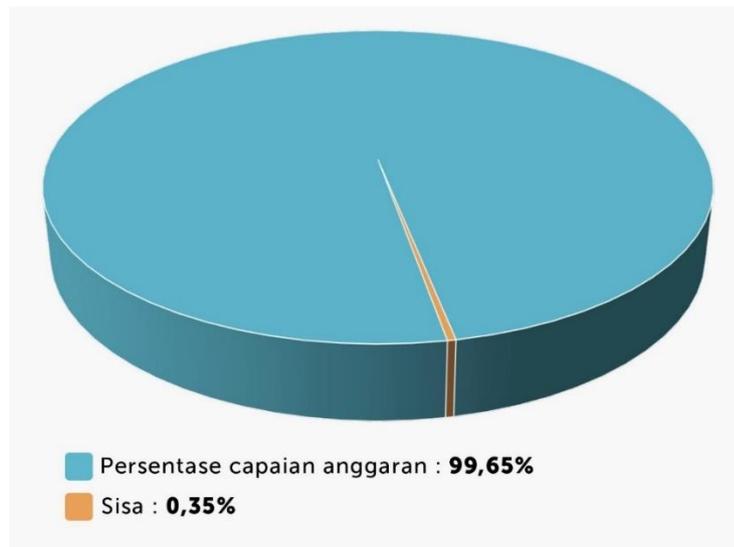
SK 1 - Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan

IKK 1.1 - Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan



SK 2 - Meningkatnya tata kelola PUSPEKA





Pada tahun 2023, seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penguatan Karakter dapat tercapai dengan baik (lebih dari 100%). Capaian tersebut didukung oleh penyerapan anggaran yang mencapai Rp 63.172.637.288 atau 99,65% dari total pagu sebesar Rp63.394.208.000.

B. Rekomendasi

Dari evaluasi kinerja, beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

1. Sasaran penyebarluasan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila, 3 dosa besar pendidikan, dan inklusivitas dan kebinekaan sebagian berada di wilayah yang sulit diakses sehingga menyulitkan untuk mengundang peserta;
2. Beberapa dinas pendidikan belum mengalokasikan anggaran untuk menindaklanjuti hasil kegiatan dengan penyebarluasan materi penguatan karakter ke satuan pendidikan dan ekosistem pendidikan di daerahnya;
3. Masih kurangnya pengetahuan terkait Profil Pelajar Pancasila seperti dari satuan kerja lain, Kementerian/Lembaga, maupun komunitas pada saat koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan;
4. Masih ada beberapa tim Satgas PPKS di Perguruan Tinggi yang tidak mengirimkan proporsi perwakilannya dengan lengkap;
5. Masih banyak sekolah yang tidak mengirimkan perwakilan fasilitator guru untuk mengikuti Bimtek Anti Perundungan;
6. Beberapa fasilitator nasional belum optimal dalam mendorong dan mengimplementasikan program penguatan karakter di wilayahnya;

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, terdapat beberapa fokus perbaikan akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Pusat Penguatan Karakter kedepannya antara lain:

1. Bekerja sama dengan komunitas atau Jaringan Masyarakat Sipil yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang berhubungan langsung dengan masyarakat, untuk membantu menyebarluaskan materi penguatan karakter;
2. Mengadvokasi dinas pendidikan untuk menyiapkan regulasi tingkat daerah supaya dapat digunakan sebagai landasan perencanaan;
3. Menjalinkan komunikasi rutin dengan para pemangku kepentingan penguatan karakter;
4. Secara rutin menyampaikan materi dan konten-konten penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila kepada satuan kerja lain, Kementerian/Lembaga, maupun komunitas agar mendapatkan gambaran dalam mengidentifikasi program yang terkait dengan Profil Pelajar Pancasila;
5. Proporsi perwakilan dalam satgas PPKS digantikan dengan unsur lainnya dengan tetap mengutamakan satgas;
6. Menghubungi pihak-pihak terkait dari Dinas Pendidikan maupun Kepala Sekolah untuk mengirimkan Fasilitator Guru yang dapat mengikuti Bimtek Anti Perundungan secara aktif;
7. Melakukan koordinasi secara intensif dengan para fasilitator nasional untuk mendorong wilayahnya melaksanakan program penguatan karakter;

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Awal



**Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala Pusat Penguatan Karakter
Dengan
Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rusprita Putri Utami

Jabatan : Kepala Pusat Penguatan Karakter

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Suharti

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 27 Juni 2023

Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Penguatan Karakter,



Suharti



Rusprita Putri Utami



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan	356
		[IKK 1.2] Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan	356
		[IKK 1.3] Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	328
		[IKK 1.4] Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter	328
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	90.80



Catatan:

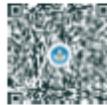
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4268	Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter	Rp. 10.469.213.000
2	6393	Kebijakan Penguatan Karakter	Rp. 54.220.755.000
		TOTAL	Rp. 64.689.968.000

Jakarta, 27 Juni 2023

Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Penguatan Karakter,



Suharti



Rusprita Putri Utami



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Perjanjian Kinerja Akhir



Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kepala Pusat Penguatan Karakter Dengan Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rusprita Putri Utami

Jabatan : Kepala Pusat Penguatan Karakter

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Suharti

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 22 Desember 2023

Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Penguatan Karakter,



Suharti



Rusprita Putri Utami



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1.0] Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan	356
		[IKK 1.2] Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan	356
		[IKK 1.3] Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	328
		[IKK 1.4] Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter	328
2	[SK 2.0] Meningkatkan tata kelola Pusat Penguatan Karakter	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	90.80



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakan merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6393	Kebijakan Penguatan Karakter	Rp. 52.924.995.000
2	4268	Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter	Rp. 10.469.213.000
		TOTAL	Rp. 63.394.208.000

Jakarta, 22 Desember 2023

Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Penguatan Karakter,



Suharti



Rusprita Putri Utami



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET TRIWULAN				REALISASI TRIWULAN			
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan								
Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan	254	288	322	356	↑ 268	↑ 298	⇒ 322	↑ 408
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan	233	274	315	356	↑ 250	↑ 287	⇒ 287	↑ 395
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	205	246	287	328	↑ 208	↑ 248	⇒ 287	↑ 358
Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen terhadap penguatan karakter	-	-	-	328	-	-	⇒ 287	↑ 358
Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter								
Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB	-	-	-	A	-	-	-	A
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85	0	0	0	90,8	0	0	0	96,8

Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
PUSAT PENGUATAN KARAKTER
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5746121, Faksimile (021) 5746121, Laman : <https://puspeka.kemdikbud.go.id>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PUSAT PENGUATAN KARAKTER TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu laporan kinerja PUSAT PENGUATAN KARAKTER untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen PUSAT PENGUATAN KARAKTER.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Januari 2024
Ketua Tim Reviu

Ian Iapoh M.R. Simarmata, M.E.
NIP 198209232015041001